

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman serta kehidupan di dunia, manusia banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditunjukkan dalam segala aspek, baik bersifat kualitas maupun kuantitas. Tantangan yang perlu dihadapi dari tingginya perkembangan manusia saat ini adalah adanya fenomena kepadatan penduduk. Manusia telah mengalami berbagai kondisi serta pertumbuhannya yang semakin meningkat jumlahnya.

Tabel 1.1

**Peringkat Jumlah Penduduk Tertinggi di Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2019**

Peringkat	Provinsi	Jumlah Penduduk
1.	Jawa Barat	49.316.700
2.	Jawa Timur	39.698.600
3.	Jawa Tengah	34.718.200
4.	Sumatera Utara	14.652.500
5.	Banten	12.927.300
6.	DKI Jakarta	10.557.800
7.	Sulawesi Selatan	8.851.200
8.	Sumatera Selatan	8.470.700
9.	Riau	6.971.700
10.	Nusa Tenggara Timur	5.456.200

Sumber : Statistik Indonesia, 2020 : 89

Tabel 1.1 menunjukkan sejumlah provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Data menunjukkan seluruh provinsi di Pulau Jawa masuk dalam peringkat jumlah penduduk tersebut. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kegiatan urbanisasi yang dilakukan hampir setiap tahun pada masa

lebaran yang menyebabkan penumpukan penduduk pada sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Pemicu meningkatnya urbanisasi di Pulau Jawa karena perekonomian yang berkembang pesat sehingga banyak masyarakat desa yang berbondong – bondong untuk mengadu nasib di Pulau Jawa. Perekonomian serta kondisi mobilitas yang meningkat di Pulau Jawa berakibat memunculkan beberapa fenomena, salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan di Pulau Jawa tidak dapat dihindari sebagai akibat dari tingginya mobilitas kendaraan yang digunakan untuk kegiatan sehari – hari.

Tabel 1.2
Peringkat Kota Termacet di Indonesia

Peringkat	Kota	Waktu Tempuh (per Tahun)
1.	DKI Jakarta	63 Jam
2.	Bandung	46 Jam
3.	Malang	45 Jam
4.	DI Yogyakarta	45 Jam
5.	Padang	45 Jam
6.	Medan	42 Jam
7.	Pontianak	40 Jam
8.	Surabaya	37 Jam
9.	Semarang	37 Jam
10.	Denpasar	30 Jam

Sumber : Kompas.com (<https://bit.ly/3tucgLP> diakses 16 Juni 2020)

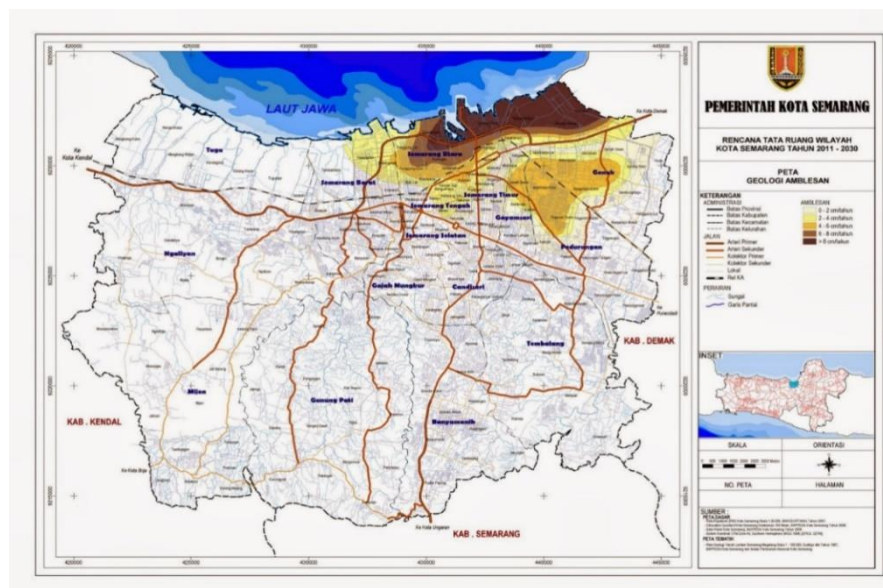
Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kemacetan pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Kota Semarang yang memiliki lama waktu tempuh yang dibutuhkan masyarakatnya berada di jalanan selama kurang lebih 37 jam dalam satu tahun. Kota Semarang merupakan jantung kehidupan bagi Provinsi Jawa Tengah, karena mayoritas kegiatan masyarakat Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Fenomen kemacetan di Kota Semarang juga disebabkan karena Kota Semarang menjadi salah satu kota yang dilalui oleh jalur perekonomian di Pulau

Jawa, yaitu Jalur Pantura (Pantai Utara Jawa). Jalur Pantura yang berada di wilayah pesisir Kota Semarang selain dikenal sebagai jalur perekonomian juga menjadi salah satu titik munculnya fenomena alam berupa banjir rob. Banjir rob merupakan fenomena kenaikan permukaan air laut yang terjadi secara cepat dan mampu untuk memasuki kawasan daratan. Sunarto, 2003 menerangkan banjir rob merupakan pola fluktuasi air laut yang disebabkan adanya gaya gravitasi oleh bulan dan matahari pada air laut di bumi.

Menurut *Marfai dan King*, 2008 dalam Erlani & Nugrahandika, 2019 : 51 banjir rob di Kota Semarang terjadi akibat adanya perubahan alih fungsi lahan di wilayah pantai dengan kemunculan sawah, tambak dan sektor lainnya. Penyebab lain timbulnya fenomena banjir rob adalah tingginya penurunan tanah yang terjadi di wilayah pesisir Kota Semarang.

Gambar 1.1

Peta Persebaran Daerah Amblesan Kota Semarang



Sumber : <https://bit.ly/2P4lwAA> diakses 7 November 2019

Gambar 1.1 menunjukkan peta persebaran wilayah Kota Semarang yang mengalami penurunan muka tanah (ambles) pada daerah Kota Semarang bagian utara. Data lebih rinci mengenai wilayah di Kota Semarang yang memiliki persoalan dengan fenomena banjir rob juga dapat diamati pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Persentase Luas Wilayah Genangan Banjir Rob Menurut Kelurahan
di Kota Semarang Tahun 2019

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Luas Genangan Rob (ha)	Persentase Wilayah (%)
1.	Gayamsari	Tambakrejo	74,25	0,62	0,835
2.	Genuk	Genuksari	244,5	11,51	4,70
3.		Gebangsari	149,79	8,59	5,735
4.		Banjardowo	324,16	4,94	1,524
5.		Sembungharjo	251	0,12	0,048
6.	Genuk	Terboyo Kulon	197,501	8,1	4,10
7.		Terboyo Wetan	242,59	11,43	4,712
8.	Semarang Barat	Tawangmas	199,57	21,71	10,878
9.		Tawangsari	208,21	2,97	1,426
10.	Semarang Utara	Tanjungmas	323,782	14,61	4,512
11.		Bandarharjo	342,68	1,51	0,440
12.	Tugu	Mangkang Kulon	399,819	4,27	1,068
13.		Mangunharjo	482,37	3,31	0,686
14.		Mangkang Wetan	346,51	15,44	4,456
	Total		3.786,732	109,13	45,12

Sumber : Arsip Dinas Pekerjaan Umum, diolah 2021

Tabel 1.3 menunjukkan data sebesar 45,12% wilayah Kota Semarang memiliki permasalahan dengan banjir rob. Kecamatan Genuk menjadi salah satu wilayah yang bergerak dalam bidang industrialisasi. Fenomena ini memiliki dampak pada kegiatan perekonomian di Kota Semarang, khususnya di Kawasan

Industri Kaligawe hingga arah Kabupaten Demak yang menjadi terhambat. Hambatan tersebut terjadi ketika fenomena banjir rob ini menerjang Jalur Pantura Kota Semarang dan menimbulkan beberapa persoalan kemacetan yang tidak dapat dihindari. Melihat kondisi yang terjadi di Jalur Pantura Kota Semarang, pemerintah perlu memberikan solusi dengan membentuk beberapa alternatif kebijakan agar persoalan tersebut dapat diatasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia memberikan solusi untuk Pemerintah Kota Semarang berupa usulan proyek pembangunan infrastruktur, salah satunya Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak merupakan proyek kerjasama antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kawasan Kaligawe, Kota Semarang hingga wilayah Sayung, Kabupaten Demak.

Gambar 1.2

Penjelasan Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak



Sumber : BPN Kabupaten Demak, 2021

Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak merupakan salah satu proyek jalan tol di atas laut, karena pembangunan tol ini tidak berada pada wilayah daratan. Jalan Tol Semarang – Demak menjadi salah satu inovasi dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa karena mayoritas pembangunan jalan tol yang dilakukan di Pulau Jawa adalah jalan tol darat. Jalan tol darat merupakan jalan tol yang dibangun berada di kawasan daratan, seperti pegunungan, hutan dan bahkan hingga dekat dengan pemukiman penduduk. Pembangunan jalan tol laut memiliki kelemahan maupun kelebihan tersendiri. Informasi dari detik.com edisi 3 April 2014 (<https://bit.ly/2Oy8emv> diakses 16 Juni 2020) menerangkan pendapat menurut Fatchur Rochman selaku Ketua Umum Asosiasi jalan Tol Indonesia (ATI) menerangkan keuntungan dari proyek pembangunan jalan tol diatas laut salah satunya terkait dengan pembebasan lahan yang tidak diperlukan karena mayoritas jalanan dibangun diatas wilayah perairan. Pembangunan jalan tol laut juga terdapat kelemahan, seperti permasalahan pencemaran lingkungan dan pembiayaan yang sangat besar. Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak direncanakan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pemecah kemacetan yang terjadi di Jalur Pantura dan mengatasi persoalan banjir rob yang telah terjadi sejak dahulu di Kawasan Kaligawe, Kota Semarang.

William N. Dunn (2004 : 44-47) dalam Wibawa, 2011 : 8 menerangkan beberapa fase perlu dilakukan dalam suatu kebijakan publik yang diawali dengan proses penyusunan agenda hingga penyelesaian kebijakan dengan proses evaluasi. Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak telah mencapai tahap pelaksanaan atau implementasi yang berjalan sejak awal tahun 2020 lalu.

Pelaksanaan suatu pembangunan infrastruktur perlu melalui beberapa fase, salah satunya adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan sebuah proyek pembangunan, baik ditingkat nasional maupun regional. Pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak berlandaskan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/52 tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.4

Lokasi Pengadaan Lahan Jalan Tol Semarang – Demak

No.	Seksi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan
1.	Seksi I	Kota Semarang	Genuk	1. Terboyo Kulon 2. Terboyo Wetan 3. Trimulyo
		Kabupaten Demak	Sayung	1. Sriwulan 2. Bedono 3. Purwosari
2.	Seksi II	Kabupaten Demak	Sayung	1. Sidogemah 2. Sayung 3. Loireng 4. Tambakroto
			Karangtengah	1. Batu 2. Wonokerto 3. Kedunguter 4. Dukun 5. Karangsari 6. Pulosari 7. Grogol
			Wonosalam	1. Karangrejo 2. Wonosalam 3. Kendaldoyong
			Demak	1. Kadilangu

Sumber : Data Rekap Disperakim Provinsi Jawa Tengah, 2020

Tabel 1.4 menunjukkan pembagian lokasi yang akan dilakukan pengadaan lahan guna pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, antara lain Seksi 1 yang terdiri dari 6 Kelurahan yang berada pada 2 Kecamatan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, serta pada Seksi 2 terdiri dari 15 Kelurahan di 4 Kecamatan yang berada di Kabupaten Demak. Fokus lokasi penelitian yang akan diambil penulis adalah salah satu kelurahan yang berada pada Seksi 1 yaitu Kelurahan Terboyo Kulon, Kota Semarang. Kelurahan Terboyo Kulon merupakan wilayah yang memiliki letak geografis berada pada wilayah pesisir utara Kota Semarang. Kelurahan Terboyo Kulon secara administratif merupakan wilayah yang terdiri dari 2 RW dan 6 RT dan memiliki kondisi wilayah yang dibangun berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut dan tambak.

Undang – Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Pasal 13 telah menerangkan terdapat 4 tahap yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengadaan lahan, antara lain Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil. Tahap perencanaan dalam pengadaan lahan dilakukan oleh pemerintah dengan mempersiapkan rancangan pembangunan yang akan dijalankan serta hal lainnya dalam realisasi pembangunan. Tahap persiapan pengadaan lahan mengharuskan pihak pemerintah selaku pihak yang membutuhkan tanah melakukan komunikasi dengan masyarakat selaku pemilik tanah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan pengadaan lahan. Hasil dari tahap ini adalah keputusan pemerintah mengenai lokasi yang akan digunakan dalam proyek pembangunan beserta rencana pelaksanaan pembangunan. Apabila keputusan tersebut telah diterbitkan, diasumsikan bahwa telah ada pola

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta pihak lainnya yang terlibat dan telah memiliki kesepakatan atas lokasi yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol tersebut. Realita di lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan pengadaan lahan masih menemui beberapa kendala.

Informasi yang diperoleh dari solopos.com edisi 12 Juni 2019 (<https://bit.ly/3tuRjQi> diakses 2 September 2019) diketahui permasalahan pengadaan lahan Jalan Tol Semarang – Demak adalah persoalan kepemilikan tanah. Sebagian besar wilayah yang akan dibangun untuk jalan tol merupakan lahan warga yang terkena abrasi. Keterangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono diketahui sebagian lahan warga yang akan terkena dampak dari pembangunan jalan tol telah hilang kepemilikannya berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria pada pasal 27. Regulasi tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional dalam Pasal 4 telah dijelaskan bahwa warga negara atau masyarakat yang terdampak pengadaan lahan dalam pembangunan strategis nasional berhak memperoleh ganti rugi apabila telah menggunakan tanah tersebut dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran terkait hak atas tanah yang mereka miliki karena aset tanah yang mereka miliki sebagian besar telah terendam oleh air laut. Masalah tumpang tindih regulasi tersebut juga menyebabkan masyarakat yang berada di lokasi pengadaan lahan memiliki kekhawatiran karena masyarakat tidak mengetahui

dengan pasti apakah tanah yang mereka miliki akan memperoleh ganti rugi pada saat proses pengadaan lahan. Penyebab dari kekhawatiran tersebut adalah mayoritas kepemilikan tanah yang dipegang oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat bila dijadikan sebagai bukti yang legal. Kondisi yang dialami oleh masyarakat memberikan asumsi bahwa pemahaman masyarakat akan permasalahan administratif pertanahan masih kurang. Asumsi tersebut diperkuat dari hasil observasi yang ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Terboyo Kulon merupakan kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang cukup rendah. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan bekerja keras. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat setempat kurang memberi perhatian terhadap persoalan administratif pertanahan karena mereka hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan primer sehari – hari.

Masalah lain yang menghambat proses pengadaan lahan guna pembangunan jalan tol ini adalah komunikasi yang kurang berjalan antara pihak – pihak yang terlibat. Komunikasi yang masih rendah didukung dengan fakta yang ditemukan seperti yang dilansir oleh tribunjateng.com edisi 14 November 2018 (<https://bit.ly/3rUuXY8> diakses 2 September 2019) yang menyatakan masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak sebagian masih belum mengetahui dan mengerti betul bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada mereka yang terkena dampak. Akibat yang timbul dari pola interaksi yang minim adalah memunculkan keraguan di masyarakat untuk menyerahkan tanah yang dimiliki guna pembangunan infrastruktur. Komunikasi memiliki keterkaitan dalam meningkatkan

keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dapat diamati dari sejauh apa informasi yang tersebar dan dipahami oleh masyarakat yang akan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dan mendukung secara penuh pelaksanaan pengadaan lahan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Hasil observasi yang diperoleh diketahui masyarakat di Kelurahan Terboyo Kulon memberikan pendapat bahwa mereka akan mengikuti secara aktif pelaksanaan dari pengadaan lahan hingga proses pembangunan jalan tol apabila pemerintah melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Faktor lain yang dapat menghambat proses pelaksanaan pengadaan lahan dalam pembangunan jalan tol ini adalah timbulnya penolakan dari masyarakat setempat. Hasil observasi diketahui bahwa beberapa masyarakat memberikan penolakan apabila pelaksanaan pengadaan lahan terjadi di wilayahnya. Masyarakat memiliki ketakutan apabila tanah yang mereka miliki tidak mendapatkan hak ganti rugi yang disebabkan status kepemilikan tanah yang kurang memiliki keterikatan hukum. Masyarakat juga memiliki ketakutan terhadap perubahan kondisi di lingkungan sekitarnya apabila pengadaan lahan tetap dilaksanakan di wilayah tersebut. Melihat kelemahan serta persoalan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan tersebut, peneliti memiliki pertanyaan yang diajukan adalah **“Mengapa Pelaksanaan Pengadaan Lahan Jalan Tol Semarang – Demak Masih Menemui Kendala dan Penolakan dari Masyarakat yang Terkena Dampak?”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat atas persiapan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak?
2. Apakah terdapat pengaruh Kondisi Sosial Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas persiapan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak?
3. Apakah terdapat pengaruh Komunikasi dan Kondisi Sosial Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas persiapan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengukur adanya pengaruh dari Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat atas persiapan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.
2. Mengukur adanya pengaruh dari Kondisi Sosial Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas persiapan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.
3. Mengukur adanya pengaruh dari Komunikasi dan Kondisi Sosial Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas persiapan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Akademis

Penelitian ini memiliki harapan agar dapat memberikan manfaat serta informasi kepada pembaca dan analisisnya dapat berguna bagi penelitian dilain waktu serta bermanfaat untuk keberlangsungan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Peneliti

Hasil penelitian ini akan membantu penulis untuk memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa Administrasi Publik dalam menganalisis serta memberikan tanggapan tentang bagaimana implementasi kebijakan dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan nasional, khususnya pembangunan jalan tol.

b. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan serta acuan sederhana bagaimana dalam mengatasi permasalahan yang selalu dihadapi dalam setiap proses pengadaan lahan untuk pembangunan nasional lainnya.

c. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas Diponegoro pada umumnya.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan serta kajian mengenai implementasi kebijakan pengadaan lahan guna untuk pembangunan nasional, khususnya telah banyak dibahas oleh beberapa akademisi dengan berbagai sudut pandang. Studi yang dilakukan oleh (Abady, 2013) terkait dengan “Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah” menerangkan bahwa faktor penentu besarnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan Musrembang antara lain komitmen pemerintah, komunikasi dan tingkat sosial – ekonomi masyarakat setempat. Studi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manggala & Mustam, 2015) dengan mengambil topik “Analisis Faktor - faktor dalam Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang” memiliki hasil bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, antara lain faktor internal yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan dan jarak lokasi kegiatan dengan rumah warga. Kemudian, untuk faktor eksternal terdiri dari perilaku kepemimpinan serta komunikasi yang berjalan.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Suroso et al., 2014) yang melakukan pengamatan pada “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” yang memiliki hasil bahwa dari 7 faktor yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, hanya 5 faktor yang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, komunikasi, umur, pekerjaan dan tingkat kepemimpinan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahmahayati, Nafisa, 2020) dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang” yang menerangkan bahwa hasil studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan program tersebut dipengaruhi oleh Kepemimpinan dan Komunikasi.

Berdasarkan kajian – kajian terdahulu tersebut, penelitian ini akan memfokuskan untuk melakukan pembuktian bahwa adanya hubungan antara Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dengan Implementasi Kebijakan Pengadaan Lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

Tabel 1.5
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Metode dan Tujuan	Hasil	Perbandingan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Pembaharuan Penelitian
1.	Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah (Abady, 2013)	• Metode Penelitian : Kualitatif • Tujuan Penelitian : Menerangkan sistem perencanaan dalam pembangunan daerah dengan mengedepankan konsep partisipatif; Menjelaskan tingkatan partisipasi masyarakat saat penyelenggaraan kegiatan Musrenbang; dan Menjelaskan faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang.	a. Penyusunan daftar kebutuhan belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat, yang mana dokumen tersebut merupakan hasil usulan melalui ketua RT dan RW setempat yang masih bersifat subjektif dan tidak melalui proses pra Musrenbang tingkat Kelurahan; b. Kurangnya sosialisasi mengenai indikator penentu program dan kegiatan prioritas dari Bappeda kepada masyarakat; c. Adanya pergeseran urutan skala prioritas yang disebabkan besarnya kepentingan kelompok dan adanya intervensi politik dari kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan tersebut; d. Munculnya inovasi dalam berbagai hal : - Dalam tahap pembiayaan dilakukan dengan model <i>sharing</i> dengan	1. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. 2. Tingkat partisipasi yang diamati antara lain Tingkat kemitraan antara LPM dan pemerintah kelurahan dan kecamatan; Tingkat kehadiran masyarakat; dan Keterwakilan masyarakat. 3. Faktor yang menentukan tingkat partisipasi antara lain Komitmen Pemerintah; Komunikasi dan Tingkat sosial	1. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif. 2. Indikator yang diamati dalam variabel Partisipasi Masyarakat adalah Tingkat kesempatan masyarakat; Tingkat kemampuan masyarakat; dan Tingkat kemauan masyarakat. 3. Variabel bebas yang digunakan adalah Komunikasi dan Kondisi sosial – ekonomi masyarakat yang terdiri dari Usia; Pekerjaan; dan Lama Tinggal.

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Metode dan Tujuan	Hasil	Perbandingan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Pembaharuan Penelitian
			masyarakat sebagai bentuk keterikatan antara masyarakat dengan program yang akan dijalankan; - Pengadaan komunikasi secara informal melalui invisible hand dengan orang – orang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan; - Kegiatan kerjasama yang melibatkan masyarakat dengan pihak swasta yang tergambar dalam kegiatan CSR. e. Belum terlaksananya pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang masih dilakukan sepenuhnya oleh kelurahan dan kecamatan setempat sehingga menyebabkan hubungan yang tidak baik dengan LPM setempat; f. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan dinilai masih rendah;	ekonomi masyarakat.	

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Metode dan Tujuan	Hasil	Perbandingan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Pembaharuan Penelitian
			g. Faktor – faktor yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat : Komitmen pemerintah; Komunikasi; dan Tingkat sosial ekonomi masyarakat.		
2.	Analisis Faktor - Faktor dalam Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang (Manggala & Mustam, 2015)	• Metode Penelitian : Kuantitatif – Eksplanatori • Tujuan Penelitian : Menerangkan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Wisata Genting; dan Menerangkan dan menganalisis Faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat.	a. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi tergolong masih rendah (51% dari total responden). b. Tingkat kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi tergolong masih rendah (56% dari total responden). c. Tingkat tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi tergolong masih rendah (58% dari total responden). d. Hubungan antara faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif dan signifikan: - Usia memiliki korelasi sebesar 0,222; - Jenis pendidikan memiliki korelasi sebesar 0,203; - Jenis pekerjaan memiliki korelasi sebesar 0,222;	1. Variabel bebas yang digunakan terdapat 6, antara lain Usia; Pendidikan; Pekerjaan; Orbitasi/Jarak; Kepemimpinan; dan Komunikasi. 2. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Simple Random Sampling</i> .	1. Variabel bebas yang digunakan yaitu Komunikasi dan Kondisi sosial – ekonomi yang terdiri dari Usia; Pekerjaan; dan Lama Tinggal. 2. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Quota Sampling</i> .

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Metode dan Tujuan	Hasil	Perbandingan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Pembaharuan Penelitian
			- Jarak rumah memiliki korelasi sebesar 0,204; - Kepemimpinan memiliki korelasi sebesar : -0,017 (tidak signifikan terhadap partisipasi); - Komunikasi memiliki korelasi sebesar : 0,106 (tidak signifikan).		
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik (Suroso et al., 2014)	• Metode Penelitian : Kuantitatif – Deskriptif • Tujuan Penelitian : Mengamati derajat keterlibatan partisipasi yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut.	a. Derajat partisipasi masyarakat dalam kegiatan menurut delapan anak tangga Arnstein hanya mencapai pada anak tangga kelima yaitu Penentruman. b. Musrenbangdes yang diselenggarakan di Desa Banjaran bukan sekedar pertemuan yang bersifat formal, tetapi kegiatan tersebut perlu menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat desa tersebut. c. Musrenbangdes juga telah dijadikan wadah bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan semua kegiatan pembangunan baik yang sudah	1. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif. 2. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tabel kontingensi dan uji <i>Chi-Square</i>. 3. Variabel bebas yang diamati adalah Tingkat Pendidikan; Komunikasi; Usia; Jenis Pekerjaan; Kepemimpinan;	1. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif Eksplanatori. 2. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan korelasi <i>Rank Kendall-Tau</i>. 3. Variabel bebas yang diamati adalah Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi yang terdiri dari Usia; Pekerjaan; dan Lama Tinggal.

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Metode dan Tujuan	Hasil	Perbandingan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Pembaharuan Penelitian
			dilaksanakan maupun yang akan direncanakan. d. Analisis faktor yang mempengaruhi Partisipasi masyarakat - Usia : terdapat hubungan dengan keaktifan partisipasi masyarakat dengan korelasi sebesar 0,322; - Tingkat pendidikan : terdapat hubungan dengan keaktifan partisipasi masyarakat dengan korelasi sebesar 0,396; - Jenis pekerjaan : terdapat hubungan dengan partisipasi masyarakat dengan korelasi sebesar 0,291; - Tingkat penghasilan : tidak ada hubungan dengan partisipasi masyarakat - Lamanya tinggal : belum tentu memberikan hubungan dengan partisipasi masyarakat - Tingkat komunikasi : terdapat hubungan dengan partisipasi masyarakat dengan korelasi sebesar	Tingkat Penghasilan; dan Lamanya Tinggal di desa.	

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Metode dan Tujuan	Hasil	Perbandingan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Pembaharuan Penelitian
			0,288; dan - Kepemimpinan : memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat dengan korelasi sebesar 0,368.		
4.	Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Rahmahayati, Nafisa, 2020)	- Metode Penelitian : Kuantitatif Eksplanatori - Tujuan Penelitian : - Mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi; - Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap partisipasi; dan - Mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi secara	- Kepemimpinan lurah masih dalam kategori rendah dan terletak pada indikator pemimpin dan anggota melakukan keputusan secara bersama-sama; - Komunikasi juga masih termasuk dalam kategori rendah dan nilai terendah pada indikator pemanfaatan media dan tindak lanjut; - Partisipasi juga masih tergolong rendah, terutama pada indikator keterlibatan masyarakat dalam pemberian materi untuk membangun Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang; - Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan partisipasi masyarakat ($4,575 > 1,661$) dan nilai signifikansi ($0,00 < 0,05$) serta nilai	- Variabel bebas yang diamati adalah Kepemimpinan dan Komunikasi. - Teknik analisis data yang digunakan antara lain : uji korelasi sederhana; uji korelasi berganda; koefisien determinasi; regresi sederhana; regresi berganda; uji T dan uji F.	- Variabel bebas yang digunakan adalah Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi yang terdiri dari Usia; Pekerjaan; dan Lama Tinggal. - Teknik analisis data yang digunakan antara lain : Rank <i>Kendall-Tau</i>; uji korelasi sederhana; dan uji koefisien konkordansi <i>Kendall-Tau</i>.

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Metode dan Tujuan	Hasil	Perbandingan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Pembaharuan Penelitian
		bersama-sama terhadap partisipasi.	koefisien determinasi sebesar 27,9%; e. Terdapat pengaruh antara komunikasi dan partisipasi masyarakat ($1,675 > 1,661$) dan nilai signifikansi ($0,04 < 0,05$) serta nilai koefisien determinasi sebesar 15,1%; f. Kepemimpinan dan komunikasi juga memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat ($10,757 > 3,09$) dan nilai signifikansi ($0,00 < 0,05$) serta nilai koefisien determinasi sebesar 28,5%.		

1.5.2 Administrasi Publik

Perkembangan ilmu tidak terlepas dari berbagai partisipasi para tokoh dan para ahli dalam mengamati suatu fenomena. Administrasi publik merupakan salah satu ilmu yang diperoleh dari hasil pengamatan serta kesimpulan dari beberapa tokoh pada permasalahan yang terjadi dalam birokrasi. *Dimock dan Dimock*; 1992 : 19 menyatakan administrasi negara menjadi bagian dari administrasi secara umum yang mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga – lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa – Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. *Waldo*; 1996 : 17 menerangkan bagaimana administrasi negara dilihat sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*Anggara*, 2012 : 134). Definisi administrasi publik juga disampaikan oleh *Nigro & Nigro* yaitu

“usaha kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup lingkungan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang memiliki peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik.”(*Keban*, 2014 : 5 - 6)

Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan setai anggota organisasi publik serta untuk mencapai kesejahteraan publik yang merata.

Definisi yang telah disampaikan oleh tokoh – tokoh pencetus ilmu administrasi publik diatas merupakan gambaran umum yang digunakan dalam menggambarkan administrasi publik dalam kehidupan sehari – hari, khususnya pada kehidupan birokrasi. Akan tetapi, definisi tersebut tidak selamanya relevan dengan karakteristik masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlu adanya penyesuaian serta memunculkan berbagai pergeseran atau yang kita kenal dengan paradigma yaitu adanya pergeseran nilai atau pola pikir dari sebuah ilmu dalam rangka untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik (Nicholas Henry, 1995)

a) Dikotomi Politik dan Administrasi

Paradigma ini memiliki fokus utama pada pemisahan antara politik dengan administrasi sebagai solusi untuk meningkatkan fungsi dari pemerintahan agar memiliki kinerja secara efektif dan efisien. Paradigma yang ditemukan oleh *Woodrow Wilson* ini memiliki tolok ukur untuk menilai efektivitas dalam administrasi publik, antara lain :

- Pemisahan politik dan administrasi;
 - Analisis perbandingan antara politik dengan organisasi swasta;
 - Menggunakan prinsip – prinsip efisiensi seperti budaya swasta;
- dan

- Menggunakan prinsip – prinsip efektivitas dalam memberikan pelayanan ke publik, baik secara manajemen dan *training* pada pelayan publik dengan menggunakan berbasis *merite system*.

b) Prinsip – Prinsip Administrasi

Paradigma ini merupakan adanya penyesuaian antara ilmu administrasi publik yang menerapkan prinsip – prinsip yang diterapkan dalam ilmu manajemen. *Gullic* dan *Urwic* (1937) mengidentifikasi poin ataupun prinsip – prinsip manajemen yang dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang memiliki kinerja yang efektif dan efisien.

Poin – poin tersebut antara lain :

- *Planning*;
- *Organizing*;
- *Staffing*;
- *Directing*;
- *Coordinating*;
- *Reporting*; dan
- *Budgeting*.

c) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Menurut *Henry* (1975) menyatakan bahwa paradigma yang tepat dalam ilmu administrasi publik adalah adanya penggabungan nilai – nilai antara ilmu politik dan administrasi publik. Hal ini karena kondisi yang terjadi dalam pemerintahan ketika masa paradigma dikotomi politik pelaksanaan administrasi yang lambat laun menghilang. Praktik dari politik dalam paradigma ini dapat dilihat ketika dalam membentuk sebuah kebijakan publik. Paradigma ini berakhir karena adanya asas “Kesejahteraan Negara (*Welfare State*)”.

d) Administrasi Publik sebagai Administrasi

Ilmu administrasi publik dalam paradigma ini mengalami pergeseran yang menunjukkan bahwa ilmu administrasi bukan bagian dari ilmu politik, namun lebih mengarah pada ilmu manajemen.

e) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Paradigma ini memandang bahwa administrasi publik mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan birokrasi, seperti hierarkis yang dipadukan dengan prinsip – prinsip dari organisasi sektor swasta. Seperti dengan paradigma sebelumnya, pada paradigma ini melihat kondisi dari pemerintahan yang memiliki permasalahan tidak efisien dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Fokus utama dari paradigma ini adalah :

- Teori Organisasi;
- Teori Manajemen; dan
- Kebijakan Publik

Paradigma ini ada telah mengalami pergeseran dengan maksud untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan serta kebutuhan dari masyarakat. Maka dari itu, muncul satu paradigma baru yaitu *Governance*.

f) *Governance*

Paradigma ini memiliki fokus yang berbeda dengan beberapa paradigma sebelumnya. Paradigma *Governance* menurut Tamayao, 2014 dalam Ikeanyibe et al., 2017 : 6 menyatakan bahwa konsep dari paradigma ini mendefinisikan tugas dari penguasa yang memiliki otoritas secara politis untuk menciptakan pemerintahan yang baik bagi masyarakatnya yang memiliki kebutuhan yang semakin kompleks memerlukan beberapa penambahan sektor dalam pelaksanaan kebijakan publik perlu memperhatikan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah; serta antara masyarakat dan pembangunan ekonomi. Paradigma ini memberikan solusi dalam persoalan dari pemerintah yaitu dengan membentuk asas desentralisasi pemerintahan. Paradigma *Governance* memiliki makna penting dalam perkembangan paham neoliberalisme. Hal terpenting adalah adanya kolaborasi antara

pemerintahan dengan sektor – sektor lain yang meliputi sektor privat; masyarakat; serta pihak ketiga lainnya.

Stoker, 2004 dalam Kurniawan, 2007 : 12 menjelaskan konsep *Governance* merupakan pengembangan pada aspek gaya pemerintah yang mana hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta menjadi tidak terbatas. Hubungan yang bias tersebut merupakan hasil tuntutan dari negara modern yang menginginkan keterlibatan publik dalam mekanisme politik dalam pemerintahan dalam pemecahan permasalahan publik secara bersama. Pandangan tersebut dapat melihat bahwa di era globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat modern yang semakin kritis. Pemerintah perlu membuka diri serta mengikutsertakan swasta serta masyarakat dengan porsi yang sama rata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menjadi angin segar dalam struktur birokrasi yang semula bersifat otoritas mutlak menjadi terbuka dan berorientasi pada kepentingan publik.

Studi ini akan menggunakan fokus utama pada paradigma keenam. Paradigma tersebut memiliki hubungan pada penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang menuntut adanya keterlibatan pihak diluar pemerintah secara aktif. Pemerintah perlu mengedepankan konsep pemerintahan yang baik dalam memperlancar keberlanjutan tujuan negara secara umum. Tujuan negara dapat dilihat

pada aktivitas negara yang terwujud dalam bentuk kebijakan – kebijakan yang dijalankan.

1.5.4 Kebijakan Publik

Keberlangsungan sebuah negara terlihat dari aktivitas atau kegiatan pemerintahannya dalam satu periode tertentu. Aktivitas – aktivitas tersebut memiliki hubungan yang saling membutuhkan dalam satu struktur pemerintahan dalam menjalankan suatu program. Kebijakan ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan suatu bentuk gambaran umum mengenai hubungan tersebut. Menurut *Robert Eyestone* dalam Winarno, 2011 : 20 & 21 menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya”. Kemudian, pendapat tersebut diperkuat oleh *Anderson* yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Definisi kebijakan publik lainnya juga disampaikan oleh *Islamy*; 1997 : 20

“kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.” (Anggara, 2012 : 501)

Melihat pernyataan tersebut, diketahui bahwa kebijakan publik merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki

untuk mengatasi persoalan yang berdampak di lingkungan publik. Teori Kebijakan Publik sendiri terdapat fase – fase yang dilalui dalam proses berlangsungnya sebuah kebijakan, yaitu :

a. Fase Formulasi Kebijakan

Fase ini merupakan tahapan yang menampung serta merumuskan beberapa alternatif kebijakan serta beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang diusung oleh kepala pemerintahan disaat masa kepemimpinannya.

b. Fase Implementasi Kebijakan

Fase ini lebih berfokus pada pelaksanaan terhadap alternatif yang telah ditentukan dan telah mendapatkan legitimasi secara hukum oleh pemerintah.

c. Fase Analisis Kebijakan

Fase ini lebih memfokuskan kegiatan *monitoring* serta melakukan beberapa analisis secara kontinu selama program dan kebijakan yang dijalankan.

d. Fase Evaluasi Kebijakan

Fase ini lebih menekankan pada tahapan untuk melakukan penilaian terhadap program dan kebijakan yang sudah terlaksana apakah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.

Penelitian ini akan lebih berfokus dalam fase implementasi, dengan maksud sesuai dengan konsep diawal bahwa peneliti akan mengidentifikasi serta menganalisis dampak dari pelaksanaan sebuah program pembangunan yang sedang berjalan.

1.5.5 Implementasi Kebijakan Publik

Setiap proses suatu kebijakan publik, terdapat satu tahap yang menjadi tolok ukur keberhasilannya yaitu adalah implementasi atau pelaksanaannya. Anggara, 2012 : 530 menuliskan pendapat dari beberapa ahli terkait konsep Implementasi Kebijakan Publik, seperti berikut :

- *Van Meter dan Van Horn* :

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

- *Pressman dan Wildavsky* :

“suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan agenda dan alternatif kebijakan publik untuk dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan program dan kebijakan yang telah disusun sebelumnya pada fase formulasi dan *agenda setting* tentu telah memiliki pedoman serta model – model yang digunakan dan menjadi ciri khas

sebuah program tersebut. Melihat studi dari kebijakan publik maupun implementasi kebijakan secara khusus banyak peneliti menggunakan beberapa model yang dikemukakan beberapa ahli.

1.5.6 Model – Model Implementasi Kebijakan Publik

Tabel 1.6

Matriks Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut 3 Pakar

	MODEL MAZMANIAN & SABATIER	MODEL VAN METER & VAN HORN	MODEL EDWARDS III
INTERNAL	Kejelasan / Konsistensi Tujuan	Standar & Sasaran Kebijakan	-
	Sumber Keuangan	Sumber Daya	Sumber Daya
	Akses – Formal Pelaksana ke Organisasi Luar	Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan	Komunikasi
	Diskresi Pelaksana	Sikap Pelaksana	Disposisi
	-	-	Struktur Birokrasi
	-	Kinerja Kebijakan	-
EKSTERNAL	Komitmen & Kemampuan Kepemimpinan Pejabat	Karakteristik Badan Pelaksana	-
	Kondisi Sosial – Ekonomi dan Teknologi	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	-
	Dukungan Publik	-	-
	Perhatian Pers	-	-

Pelaksanaan sebuah kebijakan dapat berhasil apabila terdapat hubungan timbal balik antara badan pelaksana program dengan kelompok sasaran dari program tersebut yang memerlukan adanya tindakan aktif dari

seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan suatu program. Hal tersebut diketahui sebagai bentuk dari partisipasi.

1.5.7 Partisipasi Masyarakat (Y)

1.5.7.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Setiap kegiatan yang dikatakan berhasil apabila memiliki daya tarik yang dilihat oleh setiap orang dan akan secara sukarela untuk berpartisipasi aktif dalam menyukkseskan kegiatan tersebut. Kita selalu terlibat terhadap suatu kegiatan yang pasti kita memiliki alasan – alasan tertentu antara satu orang dengan orang lain untuk mengikuti suatu acara yang sama. Hal ini benar adanya apabila kita amati setiap orang memiliki arah serta maksud untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Bila melihat beberapa definisi dari para pakar terkait penjelasan partisipasi (Mardikanto, 2012 : 81 - 82) :

1. *Borby* (1974)

“Partisipasi merupakan tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.”

2. *Beal* (1964)

“Partisipasi merupakan gejala yang diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Menurut Beal dalam definisinya menyatakan bahwa karakteristik dari proses partisipasi, antara lain mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” untuk mewujudkan suatu kegiatan yang mampu untuk mencapai tujuan tertentu.”

3. *Verhangen* (1979)

“Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Dalam hal komunikasi yang dimaksud akan muncul seiring dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh

seseorang yang terlibat mengenai : (a) kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki; (b) kondisi yang perlu diperbaiki melalui kegiatan masyarakat sendiri; (c) kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan seseorang; dan (d) adanya kepercayaan diri, bahwa hal yang diberikan merupakan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang sedang dijalankan.”

Berdasarkan definisi dari ahli diatas, disimpulkan partisipasi merupakan tindakan keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumber daya yang dimilikinya serta menjalin hubungan dengan sesamanya untuk mencapai kesepakatan yang telah ditentukan dalam suatu kegiatan. Era reformasi yang saat ini berjalan mengharuskan adanya iklim partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan. Tujuan dengan adanya reformasi itu sendiri adalah dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

1.5.7.2 Pendekatan dalam Partisipasi Masyarakat

Perencanaan suatu kebijakan pembangunan yang dilakukan di tingkat daerah terdapat beberapa pendekatan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, antara lain pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) (Bayu et al., 2018 : 59). Pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunan saat ini adalah pendekatan partisipatif. Hal ini karena pendekatan secara partisipatif digambarkan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan mengupayakan keterlibatan masyarakat serta pemangku

kepentingan pada setiap proses perencanaan pembangunan daerah. Era *Governance* telah mengedepankan pendekatan partisipatif guna memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang semula hanya dipandang sebagai objek dari pembangunan ataupun kebijakan dari pemerintah menjadi subjek atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau kebijakan tersebut. Hal ini memperkuat pendapat bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berkaitan dalam menerima dan menolak rancangan kebijakan pemerintah, namun masyarakat juga dapat memberi ide pada kebijakan tertentu bila hal tersebut diperlukan, meskipun kebijakan tersebut belum disiapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan usulan terkait segala kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah apabila tidak sesuai dengan kehendaknya.

Cleaver (2002) dalam Rahim, 2013 : 2 menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan partisipasi dalam konsep pembangunan, antara lain :

- a) Partisipasi sebagai bentuk aktivitas masyarakat dalam menaikkan efisiensi dan efektivitas pembangunan dalam mempromosikan proses – proses demokratisasi dan pemberdayaan;
- b) Partisipasi pada dikotomi instrumen (*means*) dan tujuan (*ends*); dan
- c) Partisipasi adalah *elite capture* yang dipahami sebagai keadaan antara pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor – aktor lain yang terlibat langsung dengan program-program partisipatif, melakukan kegiatan yang jauh dari prinsip partisipasi.

Pernyataan yang disampaikan oleh *Cleaver* dapat disimpulkan bahwa dalam setiap program pembangunan maupun kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah harus mengedepankan adanya keterlibatan secara langsung oleh masyarakat maupun perwakilannya, seperti keterlibatan tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

1.5.7.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Penggambaran suatu partisipasi yang ditunjukkan oleh suatu individu maupun suatu kelompok masyarakat dalam pembangunan dapat diamati dari beberapa hal, seperti yang dikemukakan oleh Yadav (UNAPDI, 1980) dalam Mardikanto, 2012 : 82 - 84 antara lain :

1) Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan

Partisipasi ini merupakan bentuk partisipasi yang dapat tumbuh apabila pemerintah membuat suatu forum yang diadakan secara terbuka. Forum terbuka tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pembangunan yang akan berjalan.

2) Partisipasi dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi ini merupakan suatu pemahaman tentang pemerataan pembagian sumber daya yang berasal dari masyarakat dan dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan. Sumber daya yang dapat diberikan oleh masyarakat dapat berupa tenaga fisik; uang

tunai; dan sumber daya lainnya. Pemerataan pembagian sumber daya tersebut perlu disesuaikan pada manfaat yang akan diperoleh masyarakat yang terlibat.

3) Partisipasi dalam Proses Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Partisipasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menghimpun data dan informasi terkait perkembangan kegiatan atau program pembangunan serta perilaku aparat pemerintah pada saat pelaksanaan program yang sedang berlangsung.

4) Partisipasi dalam Proses Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi ini merupakan suatu penggambaran suatu program dapat berhasil bila mampu untuk mencapai tujuan dari program yang akan dilaksanakan. Partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mampu untuk memanfaatkan peluang dari pelaksanaan program atau kegiatan yang notabennya dengan adanya program tersebut akan memunculkan perubahan kondisi lingkungan di sekitar wilayah masyarakat tersebut.

Dusseldorp (1981) dalam Mardikanto 2012 : 84 juga menyatakan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam suatu kegiatan, antara lain :

- 1) Ikut sebagai anggota dalam kelompok masyarakat lokal;
- 2) Ikut terlibat dalam kegiatan diskusi dalam kelompok masyarakat (kegiatan PKK, karang taruna, dan sebagainya);
- 3) Ikut terlibat pada kegiatan organisasi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya (Kader di tingkat kelurahan, dan lainnya);
- 4) Ikut dalam penggerakan sumber daya dalam kelompok masyarakat;
- 5) Ikut ambil peran pada saat pengambilan keputusan; dan
- 6) Menerima manfaat dari hasil kegiatan kelompok masyarakat tersebut.

Slamet, 1985 dalam Mardikanto (2012 : 91 - 94) yang menyatakan bahwa suatu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat diamati melalui 3 aktivitas, yaitu :

- 1) Memberikan input yang berupa tenaga fisik, keuangan, waktu, lahan, dan sebagainya;
- 2) Menerima imbalan atas input yang diberikan dapat berupa uang, jaminan kesehatan, jaminan relokasi, dan sebagainya;
- 3) Menikmati manfaat atas hasil pembangunan dapat berupa kemudahan mobilitas bagi warga, kesesuaian nilai ganti rugi yang diterima warga, dan sebagainya.

Peneliti akan melakukan pengamatan atas Partisipasi Masyarakat pada saat pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Yadav (UNAPDI, 1980). Hal tersebut karena pendapat yang disampaikan oleh Yadav telah mencakup dari pendapat beberapa

ahli, seperti pendapat dari Dusseldorp (1981) yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai hal yang telah tercakup dalam kegiatan pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan. Selain itu pendapat dari Slamet (1985) yang menjelaskan bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan atas pelaksanaan suatu program dengan tenaga fisik, keuangan, waktu, lahan, dan hal lainnya yang mana hal tersebut termasuk partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Oakley (1991) dalam Maulana, 2013 : 12 - 13 yang menerangkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh melalui beberapa hal, yaitu keterlibatan kelompok sasaran atau masyarakat secara struktural dalam panitia pelaksana; dan kelompok masyarakat dilibatkan dalam pembahasan kegiatan. Pendapat yang diberikan oleh Yadav dapat dikatakan telah mencakup dari berbagai pendapat ahli lain dalam menilai suatu partisipasi masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi dapat dikatakan memiliki nilai yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai objek kegiatan yang dirumuskan pemerintah, pemerintah sudah seharusnya melakukan hubungan dengan maksimal kepada masyarakat dan juga mampu untuk menjaga hubungan tersebut dengan meningkatkan komunikasi yang bersifat terbuka, dua arah dan juga responsif sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat.

Pelaksanaan sebuah pembangunan sangat memerlukan adanya keterlibatan masyarakat sebagai penunjang atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini didukung dengan beberapa pendapat ahli, seperti pendapat dari Keith Davis yang telah menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila memerhatikan beberapa unsur, yaitu :

- 1) Waktu, dimana hal tersebut diperlukan oleh masyarakat untuk dapat memahami informasi yang telah disampaikan oleh pemerintah atau pemprakarsa kebijakan pembangunan. Aspek ini berkaitan dengan pola komunikasi yang terjalin antara pemerintah (komunikator) dengan masyarakat (komunikan) yang akan menghasilkan pemahaman masyarakat akan maksud dan tujuan pelaksanaan pembangunan;
- 2) Pelaksanaan partisipasi memerlukan kemampuan serta pengetahuan dari masyarakat baik dalam menerima pesan yang disampaikan oleh pemerintah maupun berkaitan dengan pemikiran dan pengalaman dalam melaksanakan program pembangunan; dan
- 3) Partisipasi masyarakat diperlukan adanya hubungan komunikasi timbal balik (2 arah) yang ditunjukkan dengan kesamaan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan aspirasi sehingga terciptanya diskusi yang efektif dan seimbang (Sastropetro, 1986 : 16-17).

Pernyataan yang disampaikan oleh Keith Davis dapat dipahami bahwa pemerintah memerlukan pemahaman dari masyarakat selaku objek dari pembangunan dengan mengidentifikasi unsur yang berada dalam kelompok masyarakat tersebut baik secara sosial, budaya ekonomi dan hal lainnya. Apabila pemerintah mampu memberikan pemahaman dengan komunikasi yang bersifat timbal balik, maka akan memunculkan aksi massa yang berasal dari masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Santoso Sastropetro juga menerangkan hal serupa bahwa terdapa unsur-unsur penting yang menentukan partisipasi masyarakat, yaitu :

- 1) Komunikasi yang dapat menimbulkan pengertian yang efektif;
- 2) Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku sebagai bentuk penumbuhan kesadaran masyarakat
- 3) kesadaran masyarakat berdasarkan hasil perhitungan dan pertimbangan;
- 4) Antusiasme yang mampu menumbuhkan sikap spontanitas masyarakat melakukan sesuat tanpa ada paksaan dari pihak luar; dan
- 5) Tumbuhnya rasa tanggung jawab masyarakat sebagai upaya dari kepentingan bersama sesuai dengan kedudukannya (Sastropetro, 1986 :41).

Pendapat lain disampaikan oleh Tjokroamidjojo yang dikutip oleh Manggala & Mustam, 2015 : 6 menerangkan bahwa terdapat 3 elemen yang perlu diperhatikan dalam partisipasi masyarakat, yaitu :

- 1) Kepemimpinan, hal ini memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat untuk ikutserta yang didukung dengan pemimpin yang informal dan memiliki legitimasi yang kuat.
- 2) Komunikasi, hal ini berkaitan dengan penyampaian rencana yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami serta menerima rencana dan hasil yang disepakati bersama.
- 3) Pendidikan, hal ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk tumbuh secara mandiri dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat menjadi landasan yang mendasarkan peneliti untuk mengamati Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas Pelaksanaan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

1.5.8 Komunikasi (X1)

1.5.8.1 Definisi Komunikasi

1. *Jenis & Kelly* dalam Saputra (2013 : 17)

"Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata- kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak) ".

2. *Gode* dalam Saputra (2013 : 17)

"Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih".

3. *Brandlun* dalam Saputra (2013 : 17)

“Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego”.

4. *Menurut Edwards III* dalam Widodo (2010 : 97)

“Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik”.

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari adanya pola hubungan yang harus terjalin secara menyeluruh dan berkelanjutan dari awal hingga program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Peran komunikasi menjadi penting karena dalam pelaksanaan suatu program ataupun kebijakan pihak pelaksana kebijakan (pemerintah) membutuhkan informasi dari berbagai pihak (masyarakat maupun swasta) agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengetahui maksud, tujuan serta dampak yang akan mereka dapatkan dari program atau kebijakan tersebut. Asumsi yang muncul adalah bahwa komunikasi memberikan pengaruh terhadap aktivitas atau partisipasi dari pihak yang turut ambil peran dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Studi yang dilakukan oleh Suroso et al., 2014 menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, salah satunya adalah komunikasi. Berdasarkan studi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang tinggi antara masyarakat dengan pihak pemerintah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Penelitian tersebut merupakan salah satu pembuktian atas pendapat beberapa ahli, seperti pendapat dari Tjokroamidjojo, 1995 : 226 dalam Manggala & Mustam, 2015 : 6 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat akan berjalan baik bila dilihat dari beberapa hal, yaitu Kepemimpinan; Komunikasi dan Pendidikan. Komunikasi juga menjadi perhatian dalam studi Implementasi Kebijakan Publik, yang mana berbagai ahli telah memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan publik adalah seberapa besar komunikasi yang telah berjalan sejak awal pembentukan program hingga pelaksanaan tersebut selesai seperti Edwards III (1980); Mazmanian dan Sabatier (1983); Van Meter dan Van Horn (1975); serta menurut Howlett dan Ramesh (1995) menerangkan bahwa salah satu instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu informasi. Informasi akan didapatkan bila terdapat kegiatan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Subarsono, 2005 : 108).

1.5.8.2 Indikator Komunikasi

Gambaran kondisi dari komunikasi yang dinilai baik dengan indikator yang telah disampaikan oleh beberapa ahli atau pakar sebagai syarat atas kegiatan komunikasi. Sitorus dalam Patanduk, 2014 : 50 dalam Rahmahayati, Nafisa, 2020 : 5 menerangkan terdapat indikator dalam mengukur komunikasi yaitu : Pemberi pesan (Komunikator), Pesan, Saluran, Penerima pesan (Komunikan), dan Efek. Sutardji (2016: 10-11)

dalam Setiawan, 2019 : 22 – 24 menerangkan bahwa komunikasi memiliki beberapa indikator, antara lain :

- 1) Pemahaman, menunjukkan seberapa besar informasi yang dapat diterima oleh sasaran dari pihak yang memberikan informasi;
- 2) Kesenangan, menunjukkan seberapa besar suasana yang dirasakan oleh pihak yang menerima informasi;
- 3) Sikap, menunjukkan seberapa besar sikap yang ditunjukkan oleh sasaran atas informasi yang didapatkan;
- 4) Hubungan yang baik, menerangkan seberapa besar kelompok sasaran memiliki hubungan kepada pihak yang memberikan informasi; dan
- 5) Tindakan, menerangkan seberapa besar kesanggupan dari sasaran untuk menjalankan informasi yang diterima.

Menurut *Edwards III* dalam Winarno, 2011 : 179 - 181 terdapat beberapa dimensi yang dapat diukur dalam menjalankan komunikasi saat pelaksanaan kebijakan publik, antara lain:

- 1) Dimensi transmisi menghendaki suatu program atau kegiatan bukan hanya disampaikan pada pelaksana (implementor) kebijakan, namun perlu disampaikan juga pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi dari Deni Darmawan, Syamsuni Arman, 2015 yang melakukan pengamatan terhadap dimensi transmisi informasi dari

Edwards kedalam beberapa hal, seperti : Urgensitas komunikasi atas suatu program; Pola komunikasi antara pihak yang terlibat; Intensitas komunikasi antar pihak yang terlibat; dan Pandangan pihak terkait program yang akan dijalankan.

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menerangkan bahwa kebijakan perlu disampaikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas, agar mereka dapat mengetahui maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari program atau kegiatan tersebut sehingga masing-masing dapat mempersiapkan keperluan serta penyusunan rencana dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan Deni Darmawan, Syamsuni Arman, 2015 menerangkan kejelasan informasi dalam suatu program dapat diamati dari beberapa hal, seperti : Intensitas kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilakukan pihak yang terlibat; serta Pemahaman pihak yang terlibat akan tujuan dan manfaat program.

- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) dibutuhkan agar suatu kebijakan tidak terjadi simpang siur yang dapat membingungkan para pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Peneliti akan melakukan pengamatan Komunikasi dengan menggunakan indikator yang disampaikan oleh *Edwards III*, yaitu dalam

dimensi transmisi / perpindahan informasi, dimensi kejelasan informasi dan dimensi konsistensi informasi. Komunikasi menurut Edwards menjadi salah satu dari keempat faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik (Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012 : 85). Pernyataan dari Edwards juga didukung oleh *Mazmanian* dan *Sabatier*. Mereka menyatakan bahwa karakteristik suatu kebijakan terdapat beberapa unsur, seperti kejelasan atas isi dari kebijakan serta konsistensi dari suatu aturan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Subarsono, 2005 : 97). Hal tersebut juga disampaikan oleh Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono, 2005 : 102 yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program memerlukan adanya hubungan yang terjalin antara organisasi. Pola hubungan tersebut juga memerlukan adanya kejelasan dan konsistensi dan ketepatan dalam melakukan komunikasi. Apabila telah terjadi hubungan timbal balik secara intens serta mampu untuk melakukan pola kegiatan yang berdampingan mampu untuk mencapai tujuan program yang sedang dijalankan. Pola interaksi tersebut dapat kita kenal sebagai bentuk adanya partisipasi.

1.5.9 Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat (X2)

1.5.9.1 Definisi Kondisi Sosial – Ekonomi

Pelaksanaan sebuah kebijakan publik terdapat berbagai hal yang terlibat baik sebelum, saat ataupun sesudah pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan juga akan bersinggungan dengan berbagai hal yang menyangkut pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut, salah

satunya adalah kondisi sosial masyarakat. Penjelasan atas definisi kondisi sosial – ekonomi telah disampaikan oleh beberapa ahli, sebagai berikut :

1. *Sumardi (2001 : 21)*

“Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.”

2. *M. Sastropaja (2000)* dalam Basrowi dan Siti Juariyah, 2010 : 60

“Kondisi Sosial – Ekonomi merupakan keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya”

3. *Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2002 : 21)*

“Keadaan sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.”
(Basrowi dan Siti Juariyah, 2010)

Pendapat yang disampaikan ahli tersebut, diketahui bahwa kondisi sosial masyarakat merupakan “gambaran penempatan kedudukan yang diberikan kepada satu individu berdasarkan kondisi atau budaya yang dianut atau diketahui secara bersama dalam suatu kelompok masyarakat.” Suatu kelompok masyarakat tertentu secara tidak tampak memberikan posisi atau kewenangan yang diberikan kepada satu individu atau lebih untuk menjadi seseorang yang dapat menghimpun atau mengarahkan kelompok masyarakat untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat.

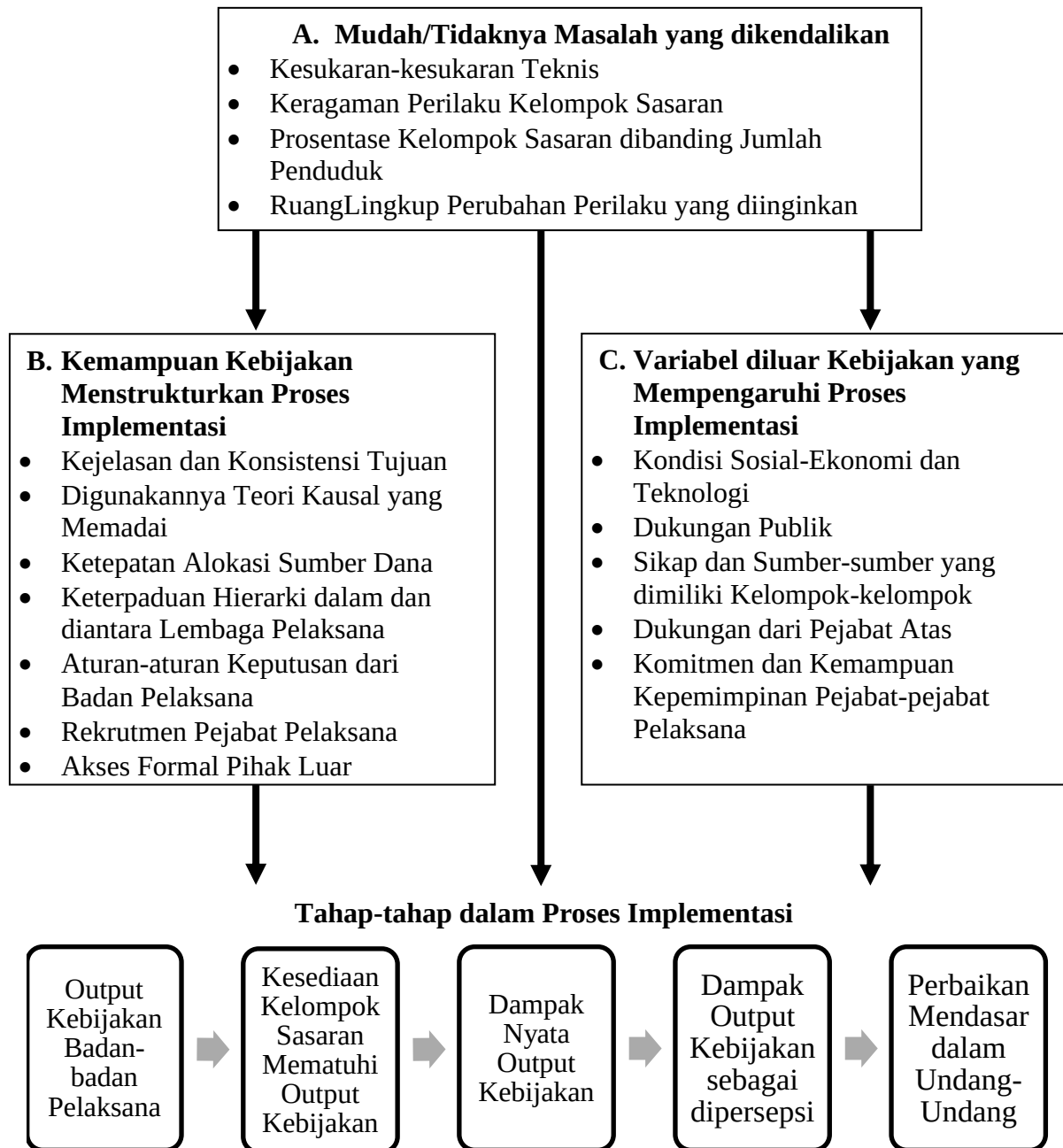
Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, 2002 : 21 dalam Basrowi dan Siti Juariyah, 2010 : 61 menunjukkan karakteristik keadaan sosial – ekonomi suatu masyarakat sebagai berikut :

- a. Masyarakat tergolong berpendidikan ;
- b. Mempunyai status sosial yang diketahui dari tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan;
- c. Memiliki laju mobilitas ke atas lebih besar ;
- d. Memiliki ladang yang luas ;
- e. Berorientasi pada bidang ekonomi komersial produk ;
- f. Memiliki sikap yang lebih berkenaan dengan kredit ; dan
- g. Pekerjaan yang lebih spesifik.

Studi Implementasi Kebijakan Publik memiliki beberapa ahli yang menerangkan bagaimana kaitannya antara berbagai macam faktor yang mampu menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. *Mazmanian* dan *Sabatier* menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan, salah satunya kondisi sosial – ekonomi masyarakat seperti pada Bagan 1.2 berikut :

Bagan 1.1

Model Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier



Sumber : Abdul Wahab, 2004 : 178

Bagan 1.1 menerangkan pandangan dari *Mazmanian* dan *Sabatier* terhadap suatu implementasi kebijakan tidak hanya memandang kepatuhan serta perilaku dari setiap aktor yang terlibat, melainkan juga memandang adanya hubungan secara politik, ekonomi dan sosial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh pihak yang terlibat (Wahab, 2015 : 135). Sehingga, dapat diketahui posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu kelompok masyarakat tersebut tergambarkan pada kondisi sosial – ekonomi yang dapat menentukan seberapa besar pengaruh yang diberikan atas pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Pendapat lain muncul dari Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab, 2015 : 165 yang menerangkan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh beberapa hal, yaitu Standar/ukuran dan tujuan dari kebijakan; Sumber – sumber kebijakan; Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; Sikap pelaksana kebijakan; dan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hood (1976) menjelaskan bahwa komunikasi yang baik dan sempurna menjadi pendukung dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi yang dimaksud tidak hanya sekedar memberikan informasi semata, melainkan pemahaman atas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat (Wahab, 2015 : 174 - 175).

1.5.9.2 Indikator Kondisi Sosial – Ekonomi

Penentuan kondisi sosial suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai petunjuk yang dapat digunakan. Gambaran atas kondisi sosial serta kondisi ekonomi sejatinya tidak dapat dipisahkan bahkan cenderung saling melengkapi. Soekanto, 2013 : 208 menunjukkan bahwa di dalam kelompok masyarakat terdapat ukuran yang dijadikan sebagai ukuran dalam penggolongan individu dalam kondisi tertentu, antara lain :

1) Ukuran Kekayaan

Ukuran ini menggambarkan kondisi seseorang yang dapat dilihat berdasarkan ukuran materiil atau hal yang dapat dihitung besaran nilainya. Ukuran tersebut menunjukkan hubungan semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maka mereka akan memiliki status sosial yang berada di atas. Kekayaan tersebut ditunjukan dengan bentuk kepemilikan aset pribadi seperti kendaraan, rumah, tanah, pendapatan, dan sebagainya.

2) Ukuran Kekuasaan

Ukuran ini digambarkan dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang dan secara tersirat diakui dalam kelompok masyarakat tersebut.

3) Ukuran Kehormatan

Ukuran ini digambarkan dengan posisi seseorang yang dipandang dan disegani oleh suatu kelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat yang masih tradisional dan memandang bahwa seseorang yang telah memasuki golongan tua dan telah bermukim dalam wilayah tersebut sejak dulu akan memiliki status dan pengakuan dari masyarakat lainnya.

4) Ukuran Ilmu Pengetahuan

Ukuran ini merupakan ukuran yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat yang memahami pentingnya ilmu pendidikan. Dalam praktiknya, kelompok masyarakat mengakui seseorang yang berhak memiliki status berdasarkan pemerolehan gelar akademis dalam suatu satuan pendidikan.

Studi yang dilakukan oleh Mamuko et al., 2016 menemukan kondisi sosial – ekonomi yang ada pada masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mampu memberikan pengaruh terhadap program upaya rehabilitasi hutan yang dikembangkan oleh pemerintah setempat, yang ditunjukkan melalui beberapa indikator, antara lain :

1. Umur, yang dijabarkan sebagai seberapa besar pengalaman dari kelompok sasaran yang akan membentuk persepsi dan perilaku mereka;

2. Pendidikan, yang dijabarkan dengan seberapa besar kemampuan untuk mendapatkan dan menggunakan informasi terkait kebijakan yang akan dijalankan;
3. Luas Kepemilikan Lahan, yang dijabarkan dengan seberapa banyak sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran berkaitan dengan kepemilikan lahan;
4. Penghasilan, yang digambarkan dengan seberapa banyak sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran berkaitan dengan pendapatan yang dimiliki berdasarkan mata pencaharian; dan
5. Tanggungan Rumah Tangga, yang digambarkan dengan seberapa banyak tanggungan yang dimiliki oleh kelompok sasaran yang akan berpengaruh terhadap persepsi atas kebijakan yang akan dilakukan.

Penelitian Mamuko merupakan salah satu dari pengembangan dari indikator yang disampaikan oleh ahli – ahli lainnya, seperti Linton, 2000 : 42 dalam Basrowi dan Siti Juariyah, 2010 : 62 yang menerangkan keadaan sosial – ekonomi suatu kelompok masyarakat dapat diamati melalui beberapa indikator, antara lain :

1. Umur dan Jenis Kelamin ;
2. Pekerjaan ;
3. Prestise ;
4. Famili / Kelompok Rumah Tangga ; dan
5. Keanggotaan dalam Kelompok Serikat.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Slamet; 1994 : 97, 137 dalam Manggala & Mustam, 2015 : 6 - 7 yang menerangkan bahwa faktor sosial – ekonomi yang berasal dari dalam kelompok masyarakat diukur melalui beberapa indikator, seperti : Jenis kelamin; Usia; Pendidikan; Pekerjaan; Lamanya tinggal; Orbitasi/Jarak; dan Sentralitas.

Peneliti akan mengamati kondisi sosial – ekonomi masyarakat atas pelaksanaan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak dalam beberapa indikator yaitu indikator usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lama tinggal. Indikator tersebut menjadi hal mendasar yang disampaikan oleh berbagai studi dan ahli. Seperti pendapat dari Linton yang menerangkan bahwa umur serta pekerjaan merupakan salah satu indikator pengukur dari suatu kondisi sosial – ekonomi kelompok masyarakat. Slamet; 1994 : 97, 137 dalam Manggala & Mustam, 2015 : 6 - 7 juga memiliki pendapat yang serupa bahwa usia; pendidikan; pekerjaan; dan lamanya tinggal seseorang dapat mengukur tingkat kondisi sosial – ekonomi dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu, pendapat tersebut juga disampaikan oleh Mubyarto, 1984 : 8 dalam Rahman, 2016 yang menerangkan bahwa ukuran yang dapat digunakan dalam mengetahui kondisi sosial – ekonomi suatu masyarakat antara lain pendidikan, pendapatan, motivasi, persepsi, status sosial, serta ketersediaan masyarakat untuk berpartisipasi.

1.5.9.1 Usia

Slamet, 1994 : 97,131 dalam Manggala & Mustam, 2015 : 6 - 7 menerangkan salah satu aspek yang menjadi identifikasi kondisi sosial suatu kelompok masyarakat adalah umur dan jenis kelamin. Umur merupakan tahapan atau fase dari seseorang yang ditunjukkan dengan angka. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan umur atau usia sebagai lama waktu seseorang hidup di dunia. Sebagian orang memandang umur sebagai salah satu indikasi seseorang memiliki status dalam suatu kelompok masyarakat. Masyarakat kita juga memiliki beberapa budaya atau pandangan mengenai umur, seperti tanda kedewasaan seseorang ataupun pemerolehan hak istimewa dalam pelayanan publik.

Umur memiliki keterkaitan akan hak serta kewajiban seseorang untuk menjadi tulang punggung keluarga atau dalam hal ini memunculkan konsep usia produktif. Usia produktif atau usia kerja menurut Badan Pusat Statistik, 2020 dalam dokumen Statistik Indonesia tahun 2020 adalah masa usia yang berada pada kisaran 15 tahun keatas. BPS menerangkan bahwa seseorang yang telah berada pada usia 15 tahun keatas merupakan penduduk yang telah memiliki hak untuk memiliki pekerjaan ataupun menjalankan roda perekonomian. Usia tidak produktif menurut Badan Pusat Statistik dalam lamannya <https://bit.ly/3oFzUTT> diakses 2 September 2020 menerangkan bahwa usia tidak produktif adalah ketika seseorang telah

memasuki usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Dampak yang dapat timbul di lingkungan masyarakat adalah muncul persepsi untuk membentuk kelas sosial yang dibangun berdasarkan kelompok usia tertentu. Klasifikasi kelompok usia tersebut akan memberikan pengaruh akan aktivitas di dalam suatu kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan bersama. Hal tersebut karena umur memiliki kaitan dengan pengalaman yang mampu membentuk persepsi dan perilaku seseorang dalam kelompok masyarakat tersebut (Mamuko et al., 2016 : 83).

Studi ilmu sosial mengenai proses pembentukan lapisan sosial dalam suatu kelompok masyarakat menurut Soekanto, 2013 : 208 menerangkan bahwa usia menjadi pertimbangan ukuran kehormatan yang diberikan kepada seseorang, karena persepsi yang tumbuh dalam masyarakat yang memandang kelompok usia tertentu telah memiliki pola pikir yang matang dan memiliki pengalaman dalam mengatasi setiap permasalahan. Kelompok usia tersebut akan selalu dilibatkan pada setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan Penelitian ini memiliki batasan pada indikator usia yang akan diteliti yang akan dijadikan sebagai responden yang sesuai adalah kelompok penduduk yang berada pada rentang usia antara 20 – 65 tahun dengan alasan bahwa rentang usia tersebut dipandang telah memiliki pola pikir yang matang serta

memiliki posisi untuk mewakili suatu kelompok masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

1.5.9.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur dari munculnya status sosial yang dimiliki oleh seseorang (Soekanto, 2013 : 208). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau suatu kelompok sebagai usaha untuk mendewasakan manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan salah satu pembentuk individu agar mampu mempersiapkan diri di dalam kehidupan masa depannya, baik kehidupan sosial maupun kehidupan secara ekonomi. Pendidikan memiliki peran dalam membentuk individu agar mampu memiliki pola pikir serta karakter yang berada pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Nasution, 1999 : 10 dalam Udin, 2010 : 35 menyatakan bahwa pendidikan merupakan “suatu proses kegiatan belajar mengajar atas pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.”

Pendidikan yang berjalan di Indonesia terdapat beberapa jenis. Ngadiyono, 1998 dalam Jaya et al., 2020 : 55 menerangkan bahwa terdapat 3 jenis pendidikan antara lain pendidikan secara formal; pendidikan secara informal; dan pendidikan secara nonformal. Penelitian ini memiliki batasan dalam mengukur pendidikan suatu

kelompok masyarakat adalah pendidikan formal. Hal tersebut karena pendidikan formal merupakan bentuk pendidikan ini diberikan secara sistematis dan berjenjang; serta pendidikan formal memiliki ukuran yang dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 14 menerangkan bahwa secara nasional, jenjang pendidikan formal terdiri dari beberapa fase, yaitu :

- a) Pendidikan tingkat dasar, yang dikenal dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat;
- b) Pendidikan tingkat menengah, yang dikenal dalam bentuk dalam Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat;
- c) Pendidikan Tinggi, yang dikenal dalam bentuk pendidikan Diploma, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.

Seseorang dapat memiliki status sosial tertentu di dalam kelompok masyarakat apabila ia telah mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi dari mayoritas populasi penduduk setempat. Konsep pembentukan lapisan sosial menurut Soekanto, 2013 : 208 menerangkan bahwa salah satu ukuran yang terbentuk dalam masyarakat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran tersebut memiliki

gambaran bahwa seseorang akan menempati lapisan atas apabila memiliki kemampuan serta pemahaman akan ilmu pengetahuan tersebut dan dapat dibuktikan melalui jenjang pendidikan yang telah dicapai. Peneliti akan menganalisis Kondisi Sosial – Ekonomi masyarakat Kelurahan Terboyo Kulon dengan indikator persebaran pendidikan formal yang telah dicapai oleh masyarakat.

1.5.9.3 Pekerjaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pekerjaan merupakan pencaharian; yang menjadi pokok penghidupan; atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Suroto, 1992 : 15 dalam Udin, 2010 : 55 menerangkan bahwa pekerjaan merupakan “kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat dirasakan bagi diri sendiri atau bagi orang lain dalam kurun waktu tersebut.” Definisi pekerjaan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara rutin dan dari kegiatan tersebut memiliki manfaat dalam bentuk finansial atau bentuk lainnya yang mampu untuk memenuhi kehidupannya. Mayoritas orang memandang pekerjaan hanya sebatas pada aspek ekonomi saja, namun perlu diketahui juga bahwa suatu pekerjaan yang dijalankan seseorang harus menyesuaikan dengan nilai sosial serta budaya yang berkembang pada kelompok masyarakat dimana ia bermukim. Pekerjaan juga akan memberikan pengaruh dalam pembentukan perilaku seseorang, serta pengalaman

kerja yang dimiliki akan membantu seseorang dalam kegiatan bermasyarakat (Udin, 2010 : 56).

Perkembangan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia telah beragam dari berbagai aspek kehidupan, baik di bidang kuliner, jasa, barang dan sebagainya. Berdasarkan data yang dilampirkan oleh Badan Pusat Statistik dalam dokumen “Statistik Indonesia tahun 2020” menerangkan bahwa secara umum terdapat kurang lebih 17 jenis pekerjaan yang tersebar dari berbagai sektor dan wilayah. T. Hani Handoko, 1991 : 123 dalam Udin, 2010 : 56 - 57 menerangkan bahwa terdapat beberapa jenis pekerjaan yang ada di masyarakat, antara lain :

a) Tenaga bidang profesional, teknisi, dan sejenisnya

Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian serta jenjang pendidikan tertentu, seperti guru, dokter, dosen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lainnya.

b) Tenaga bidang kepemimpinan dan ketatalaksanaan

Pekerjaan ini memerlukan pendidikan khusus, namun beberapa pekerjaan tidak memerlukan pendidikan khusus dan dapat dipelajari secara otodidak seperti sekretaris, bagian administrasi, tata usaha, dan lainnya.

c) Tenaga usaha penjual

Jenis pekerjaan ini dapat dilakukan oleh siapapun dan hanya memerlukan keramahan, komunikasi yang baik, ulet, tekun, dan mudah bergaul seperti penjual toko, *salesman*, dan sebagainya.

d) Tenaga usaha jasa

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang memberikan jasa kepada orang lain dan biasanya pekerjaan ini memerlukan keahlian tertentu dan dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal seperti tukang cukur, tukang jahit, dan sebagainya.

e) Tenaga usaha pertanian dan perikanan

Beberapa jenis pekerjaan ini memerlukan pendidikan khusus, namun ada juga pekerjaan yang hanya memerlukan ketekunan seseorang seperti petani, peternak, dan sebagainya.

f) Tenaga produksi, operator angkutan, dan tenaga kasar

Jenis pekerjaan ini tidak memerlukan jenjang pendidikan tertentu, tetapi tetap memerlukan latihan secara terus menerus seperti pekerja pabrik, buruh, kuli, dan sebagainya.

Penulis akan menentukan batasan terkait dengan pekerjaan yang akan diamati pada masyarakat Kelurahan Terboyo Kulon, yaitu tenaga profesional, tenaga usaha perdagangan, dan tenaga kasar.

1.5.9.4 Pendapatan

Pendapatan digambarkan sebagai hasil yang diperoleh seseorang atas kegiatan yang dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Christopher dalam Wijianto & Ulfa, 2016 : 194 menerangkan bahwa pendapat (menurut kamus ekonomi) adalah uang yang diterima oleh

seseorang dalam bentuk gaji, upah, bunga, laba serta bentuk keuntungan lainnya. Penentuan pendapatan seseorang tentunya memerlukan pedoman atau standar yang telah diakui sehingga tidak akan memunculkan ketimpangan sosial pada setiap individu. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Jaya et al., 2020 : 56 telah memiliki penggolongan atas pendapatan penduduk dalam beberapa kategori, antara lain :

- a) Golongan pendapatan sangat tinggi, yaitu apabila seseorang memiliki pendapatan rata – rata lebih dari Rp 3.500.000 per bulan.
- b) Golongan pendapatan tinggi, yaitu apabila seseorang memiliki pendapatan rata – rata dalam rentang > Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 3.500.000 per bulan.
- c) Golongan pendapatan sedang, yaitu apabila seseorang memiliki pendapatan rata – rata dalam rentang > Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.500.000 per bulan.
- d) Golongan pendapatan rendah, yaitu apabila seseorang memiliki pendapatan rata – rata dibawah Rp 1.500.000 per bulan.

1.5.9.5 Lama Tinggal

Lama tinggal merupakan gambaran seseorang yang diakui sebagai penduduk atau menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Lama tinggal juga dikaitkan dengan durasi seseorang

mendiami suatu tempat. Slamet, 1994 : 97,131 dalam Manggala & Mustam, 2015 : 6 - 7 menerangkan lamanya seseorang berada pada suatu wilayah menjadi salah satu indikator yang membentuk kondisi sosial suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut karena semakin lama seseorang bermukim dalam suatu wilayah tertentu akan menimbulkan rasa memiliki terhadap lingkungan yang tinggi yang akan terlihat dalam partisipasinya untuk keberlangsungan suatu program yang berjalan di lingkungan tersebut (Angell dalam Ross, 1967: 130 dikutip dalam <https://bit.ly/3u7R65v> diakses 2 Oktober 2020).

Pelaksanaan penanganan dampak sosial seperti yang terterang dalam Perpres No. 56 tahun 2017 telah dijelaskan bahwa masyarakat berhak menuntut ganti rugi atas proses pembangunan nasional yang berjalan di lingkungan mereka dengan syarat telah memiliki dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 tahun secara terus menerus. Dengan demikian, batasan dari indikator lamanya tinggal masyarakat yang dapat diamati mengikuti pedoman yang telah ditunjukkan dalam Perpres No. 56 tahun 2017 yaitu untuk penduduk yang telah bermukim di atas 10 tahun.

1.5.10 Pengadaan Lahan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, melihat kepadatan penduduk yang semakin meningkat dan kebutuhan akan kepemilikan lahan semakin padat

menimbulkan pemerintah tidak memiliki lahan yang benar – benar bersih dari kepemilikan. Pemerintah ketika ingin melakukan pembangunan yang membutuhkan lahan yang luas, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan lahan.

Pengadaan lahan juga mendapatkan beberapa masukan atau pendapat dari pakar, antara lain :

1. *Abdurrahman*, 2011 : 10

“Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum semula yang terdapat di antara pemegang hak atas tanah dengan cara pemberian ganti rugi dengan pihak yang bersangkutan.” (Mulyadi, 2017)

2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

“Pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang memiliki hak.”

3. Surat Keputusan Presiden RI No. 55 tahun 1993

“Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah”

Pengadaan lahan dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu yang melakukan ambil alih lahan tertentu dengan tujuan untuk mengadakan sarana atau fasilitas demi kepentingan publik. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menjelaskan bagaimana

dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan lahan guna proyek pembangunan strategis, seperti jalan tol. Pelaksanaan persiapan pengadaan lahan memiliki beberapa proses yang perlu dilakukan, yaitu :

- 1) Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Lahan, proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh Gubernur untuk membentuk satu tim sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan lahan.
- 2) Pemberitahuan Rencana Pembangunan, proses ini menjadi proses penyampaian rencana pembangunan kepada masyarakat di lokasi pengadaan lahan.
- 3) Pendataan, proses ini merupakan proses pengumpulan informasi mengenai pihak yang memiliki hak atas tanah serta objek yang akan dilibatkan dalam pengadaan lahan.
- 4) Konsultasi Publik, merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan antara pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang memiliki hak atas tanah yang akan digunakan.
- 5) Tim Kajian Keberatan, merupakan proses pelaporan yang dilakukan Tim Persiapan Pengadaan Lahan apabila dalam proses konsultasi publik belum menemukan kesepakatan dengan pihak yang berwenang atas tanah.

Regulasi tersebut menjadi angin segar yang dirasakan oleh masyarakat publik yang nantinya akan menjadi sewaktu – waktu akan

menjadi objek dari pengadaan lahan, karena telah terdapat regulasi yang menjadi payung hukum apabila terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam proses pengadaan lahan. Dalam setiap proses pengadaan lahan terdapat pembentukan tim pengadaan lahan yang berfungsi sebagai penghubung pemerintah sebagai penyedia lahan dan juga masyarakat sebagai pihak yang memiliki kuasa atas lahan.

1.5.11 Hubungan Antar Variabel

1.5.11.1 Hubungan Antara Variabel Komunikasi (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Penelitian ini akan menunjukkan hasil apakah terdapat pengaruh antara dari masing – masing variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini tidak serta merta hanya ingin membuktikan teori semata, akan tetapi telah terdapat beberapa ahli yang menerangkan bagaimana antara variabel Komunikasi (X1) memiliki hubungan terhadap variabel Partisipasi Masyarakat (Y) yang menjadi pendukung pelaksanaan penelitian ini. Seperti hal yang disampaikan menurut Tjokroamidjojo, 1995 : 226 yang dikutip oleh Manggala & Mustam, 2015 menerangkan bahwa partisipasi dalam pembangunan memerlukan komunikasi sebagai wujud penyampaian atas gagasan dan rencana kebijakan agar dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. Bila penyampaian dapat terlaksana secara menyeluruh dengan memberikan gagasan yang mencerminkan sebagian atau seluruh aspirasi dari masyarakat maka masyarakat akan memberi dukungan serta berpartisipasi secara aktif.

Pendapat Tjokroamidjojo tersebut juga didukung dari pendapat Mikkelsen yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat diketahui sebagai proses penghubung dialog antara komunitas lokal dan pihak pelaksana proyek yang berkaitan dengan proses persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi staf agar mampu memperoleh informasi terkait kontes sosial maupun dampak sosial atas proyek yang dijalankan terhadap masyarakat (Maulana, 2013).

Pendapat lain dari Santoso Sastropoetro, 1986 : 41 yang menerangkan bahwa salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam partisipasi masyarakat adalah komunikasi yang berjalan dengan efektif. Komunikasi yang dijalankan secara berkelanjutan mampu menumbuhkan kesadaran serta rasa tanggung jawab dari masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pembangunan yang akan berjalan di wilayah setempat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa berdasarkan pendapat dari berbagai pakar diketahui terdapat pengaruh antara variabel Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat.

1.5.11.2 Hubungan Antara Variabel Kondisi Sosial Masyarakat (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Penelitian ini juga akan membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel Kondisi Sosial Masyarakat (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Beberapa pakar dan ahli telah memberikan pendapat yang menunjukkan adanya hubungan tersebut, seperti Darjono dalam

Sastropoetro, 1986 : 22 menunjukkan bahwa pendidikan, kemampuan memnaca dan menulis, kemiskinan, dan kedudukan sosial menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Darjono menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan akan diterima secara utuh apabila pemerintah melibatkan segala aspek, seperti aspek budaya, kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang berlaku agar dapat menciptakan keterlibatan masyarakat yang merata.

Pendapat serupa disampaikan oleh Dusseldorp, 1981 dalam Mardikanto, 2012 menjelaskan bahwa derajat kesukarelaan partisipasi dari masyarakat terdapat beberapa indikasi, salah satunya partisipasi yang disebabkan oleh adanya alasan sosial – ekonomi yang digambarkan bagaimana peran masyarakat didasarkan pada ketakutan untuk kehilangan status sosial atau menemui kerugian atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pernyataan bahwa variabel Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap variabel Partisipasi Masyarakat.

1.5.11.3 Hubungan Antara Variabel Komunikasi (X1) dan Kondisi Sosial Masyarakat (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

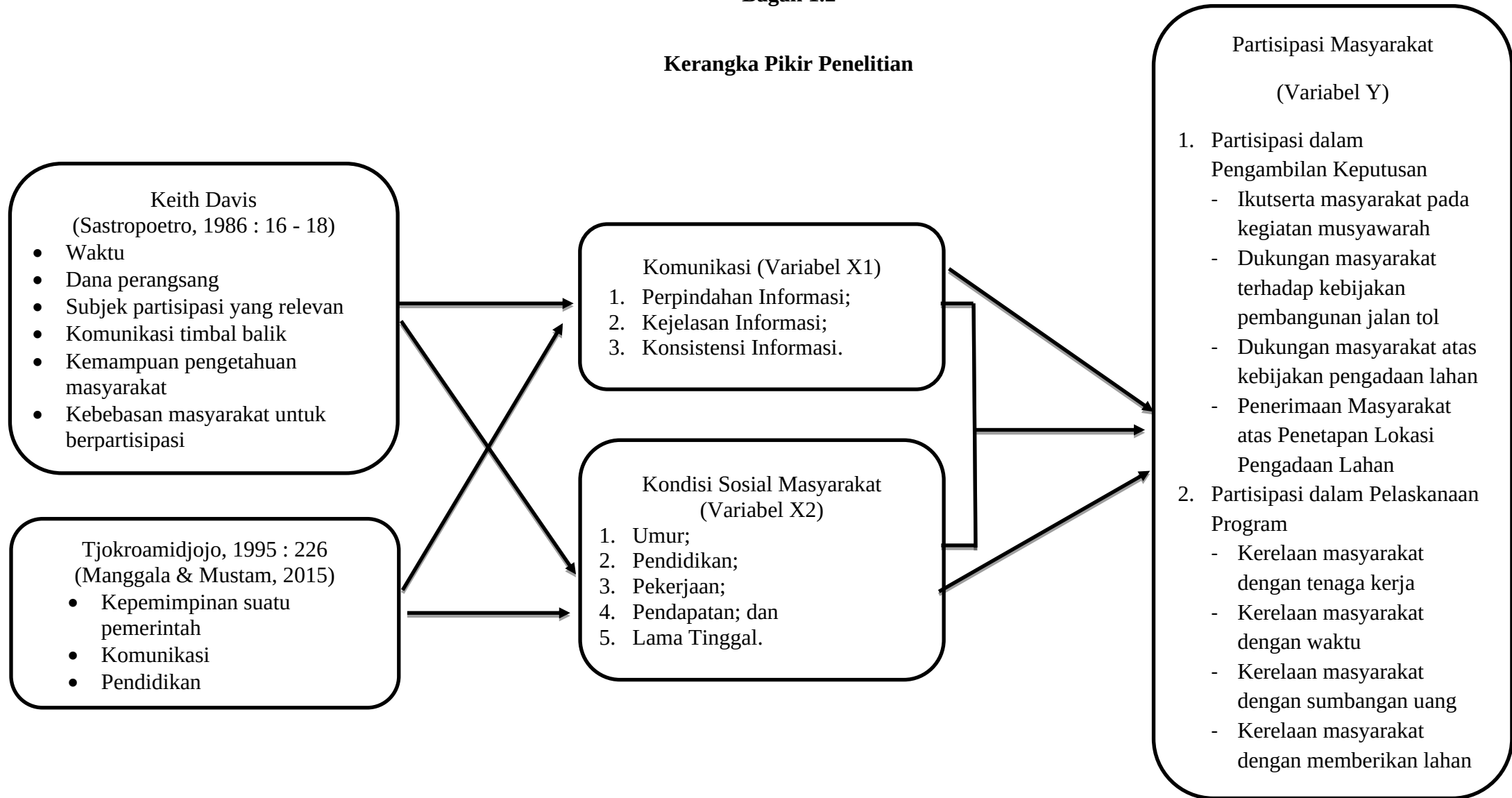
Penelitian ini juga akan menunjukkan adanya pengaruh variabel Komunikasi dan Kondisi Sosial Masyarakat terhadap Partisipasi masyarakat atas pelaksanaan suatu program pembangunan. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai adanya pengaruh tersebut. Menurut Santoso Sastropoetro, 1986 : 41 menerangkan bahwa terdapat beberapa unsur penting yang menentukan keberhasilan suatu partisipasi masyarakat, antara lain : komunikasi yang efektif; perubahan sikap dan perilaku; kesadaran yang berdasarkan pada perhitungan dan pertimbangan; antusiasme yang menumbuhkan spontanitas; dan tumbuhnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Keith Davis juga memberikan pendapat mengenai persyaratan yang perlu diperhatikan dalam memunculkan partisipasi masyarakat, antara lain (1) Waktu yang diperlukan masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah/pemprakarsa kebijakan; (2) Kemampuan masyarakat yang mumpuni yang berkaitan dengan luas pemikiran dan pengalaman dalam bidang yang diperlukan pada pelaksanaan pembangunan; serta (3) Adanya pola komunikasi timbal balik antara masyarakat (komunikan) dan pemerintah (komunikator) dalam memberikan informasi, maksud serta tujuan pelaksanaan pembangunan (Sastropoetro, 1986 : 16-17).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Slamet, 1994 : 97, 137 yang dikutip Manggala & Mustam, 2015 yang menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, orbitasi/jarak, dan sentralitas yang berada pada suatu lingkungan kelompok masyarakat. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat.

Bagan 1.2

Kerangka Pikir Penelitian



1.5.12 Variabel Bebas

- a. Intensitas Komunikasi yang dilakukan kepada Masyarakat yang dinilai berdasarkan indikator Transmisi Informasi, Kejelasan Informasi, dan Konsistensi Informasi.
- b. Kondisi Sosial Masyarakat yang akan terdampak Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yang akan dinilai berdasarkan Umur; Jenis Pekerjaan; serta Lama Tinggal.

1.5.13 Variabel Terikat

- a. Partisipasi Masyarakat yang akan terdampak kebijakan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yang akan dinilai berdasarkan indikator Kesempatan untuk Berpartisipasi; dan Kemauan untuk Berpartisipasi.

1.6 Hipotesis

Hipotesis Awal (Ho) :

- a) Jika Komunikasi rendah, maka Partisipasi masyarakat akan meningkat; begitu juga sebaliknya.
- b) Jika Kondisi Sosial masyarakat rendah, maka Partisipasi masyarakat akan meningkat; begitu juga sebaliknya.
- c) Jika Komunikasi dan Kondisi Sosial masyarakat rendah, maka Partisipasi masyarakat akan meningkat; begitu juga sebaliknya.

Hipotesis Alternatif (Ha) :

- a) Jika Komunikasi rendah, maka Partisipasi masyarakat akan rendah; begitu juga sebaliknya.
- b) Jika Kondisi Sosial masyarakat rendah, maka Partisipasi masyarakat akan rendah; begitu juga sebaliknya.
- c) Jika Komunikasi dan Kondisi Sosial masyarakat rendah, maka Partisipasi masyarakat akan rendah; begitu juga sebaliknya.

1.7 Definisi Konsep

Partisipasi adalah suatu pola kerja yang terbentuk secara struktural bagi masyarakat dalam menjalankan sebuah kebijakan pembangunan yang dapat diukur melalui Kesempatan masyarakat; Kemampuan masyarakat; dan Kemauan masyarakat.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi publik yang terdiri dari Transformasi Informasi; Kejelasan Informasi; dan Konsisten Informasi yang dapat menggambarkan suatu kebijakan publik dengan jelas.

Kondisi sosial merupakan gambaran penempatan kedudukan sosial yang diberikan kepada satu individu berdasarkan usia, jenis pekerjaan dan lamanya tinggal dalam suatu kelompok masyarakat.

1.8 Definisi Operasional

Partisipasi terdapat hal – hal yang menjadi pembahasan utama yaitu :

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - 1) Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah yang diadakan Tim Persiapan Pengadaan Lahan;
 - 2) Tingkat dukungan masyarakat terhadap penetapan lokasi pengadaan lahan di Kelurahan Terboyo Kulon;
 - 3) Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengadaan lahan Jalan Tol Semarang – Demak; dan
 - 4) Tingkat penerimaan masyarakat atas hasil penetapan lokasi pengadaan lahan.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
 - 1) Tingkat kerelaan tenaga kerja masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan lahan;
 - 2) Tingkat kerelaan waktu masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan lahan;
 - 3) Tingkat kerelaan masyarakat untuk memberikan sumbangan uang dalam pelaksanaan pengadaan lahan
 - 4) Tingkat kerelaan masyarakat untuk memberikan lahan dalam pelaksanaan pengadaan lahan

Kemudian, dalam Komunikasi terdapat beberapa indikator yang dapat diamati, antara lain :

a) Perpindahan informasi

- 1) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pembangunan jalan tol;
- 2) Tingkat kesempatan masyarakat untuk berpendapat saat proses penetapan lokasi pengadaan lahan;
- 3) Tingkat keterlibatan masyarakat secara langsung saat proses penetapan lokasi pengadaan lahan;
- 4) Tingkat kemampuan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengadaan lahan; dan
- 5) Tingkat pemahaman masyarakat atas informasi tentang pengadaan lahan pembangunan jalan tol.

b) Kejelasan informasi

- 1) Intensitas pemerintah dalam memberikan informasi terkait pembangunan jalan tol;
- 2) Tingkat kemudahan metode yang digunakan pemerintah dalam melakukan sosialisasi proses pengadaan lahan; dan
- 3) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi secara penuh.

c) Konsistensi informasi

- 1) Tingkat pemahaman masyarakat terkait proses pengadaan lahan jalan tol;

- 2) Tingkat pemahaman masyarakat terkait prosedural dalam pemerolehan ganti rugi;
- 3) Tingkat kepastian lokasi pengadaan lahan yang diberikan oleh pemerintah; dan
- 4) Tingkat kemudahan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai penetapan lokasi.

Kondisi Sosial – Ekonomi memiliki indikator yang akan digunakan antara lain :

a) Usia :

- 1) Jumlah masyarakat yang berada pada golongan rentang usia antara 20 – 65 tahun, dan
- 2) Tingkat keterlibatan masyarakat rentang usia antara 20 – 65 tahun dalam program.

b) Pendidikan :

- 1) Karakteristik tingkat pendidikan dalam masyarakat, dan
- 2) Tingkat keterlibatan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dalam program.

c) Pekerjaan :

- 1) Ragam mata pencaharian dalam masyarakat, dan
- 2) Tingkat kesediaan waktu dari masyarakat untuk mengetahui informasi tentang program.

d) Pendapatan :

- 1) Karakteristik golongan pendapatan masyarakat, dan

2) Tingkat keterlibatan masyarakat berdasarkan golongan pendapatan dalam program.

e) Lama tinggal :

- 1) Jumlah masyarakat yang telah bermukim paling singkat 10 tahun;
- 2) Tingkat keterlibatan masyarakat yang bermukim di atas 10 tahun dalam program.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kuantitatif. Sugiyono (2016 : 8) menyatakan bahwa metode ini merupakan penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Penelitian ini memiliki sifat aktual yang tinggi, hubungan dengan yang diteliti bersifat independen atau terpisah, dan menilai hubungan kausalitas (sebab – akibat) antara setiap variabel yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatori, hal tersebut karena peneliti ingin menguji hipotesis yang telah terbentuk serta untuk menjelaskan hubungan antara variabel Komunikasi (X1) dan Kondisi Sosial Masyarakat (X2) terhadap

Partisipasi Masyarakat (Y) atas pelaksanaan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2016 : 80). Purwanto, 2011 : 37 menyatakan bahwa populasi merupakan semua individu/unit – unit yang menjadi target penelitian. Populasi yang menyangkut permasalahan ini adalah masyarakat yang terkena dampak pengadaan lahan pada salah satu kelurahan di Kota Semarang yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/1973 tahun 2018. Akan tetapi, penentuan populasi dalam persoalan pengadaan lahan jalan tol ini menemui kesulitan, yang mana disebabkan data yang dapat dihimpun oleh peneliti adalah data jumlah penduduk secara umum yang mana seharusnya dapat lebih difokuskan pada jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak pengadaan lahan Jalan Tol Semarang - Demak.

Penelitian ini melakukan kajian pada salah satu populasi dari wilayah seksi I dalam pengadaan lahan Jalan Tol Semarang – Demak yaitu pada Kelurahan Terboyo Kulon. Hal ini karena pada

wilayah Kelurahan Terboyo Kulon merupakan wilayah yang berdekatan dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol tersebut. Data dari website resmi Kelurahan Terboyo Kulon (<https://terboyokulon.semarangkota.go.id/> diakses 4 Oktober 2020) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Terboyo Kulon sebanyak 616 orang.

1.9.2.2 Sampel

Secara umum, sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2016 : 81). Maka dari itu, rumus perhitungan sederhana yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2002:59) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n : Ukuran Sampel
- N : Ukuran Populasi
- e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir

Penelitian ini dengan jumlah sasaran utama sebanyak 616 penduduk dan dengan taraf kesalahan 10%, maka diketahui bahwa sampel yang harus diambil adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{616}{1 + (616)(0,1)^2}$$

$$n = 86,033$$

$$n = 86 \text{ responden}$$

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Terdapat 2 jenis teknik pengumpulan data, yaitu *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling*. Menurut Sugiyono, 2016 : 82 *Probability Sampling* merupakan teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi. Sebaliknya, teknik *Non-Probability Sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *Probability Sampling* memiliki beberapa jenis, diantaranya :

- *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.
- *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu teknik yang digunakan bila populasi yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

- *Disproportionate Stratified Random Sampling*, yaitu teknik yang digunakan bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.
- *Cluster Sampling (Area Sampling)*, yaitu teknik yang digunakan bila objek yang diteliti sangat luas.

Penelitian *Non-Probability Sampling* juga memiliki beberapa klasifikasi diantaranya :

- *Sampling Sistematis*, yaitu penentuan sampel dengan metode pemberian nomor urutan dari anggota populasi.
- *Sampling Kuota*, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang memiliki ciri – ciri tertentu sampai kuota yang ditentukan dapat terpenuhi.
- *Sampling Insidental*, yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan. Teknik ini dilakukan pada siapa saja yang ditemui oleh peneliti dapat dijadikan sebagai sampel.
- *Sampling Purposive*, yaitu teknik yang digunakan dengan memilih sampel dengan berbagai ketentuan yang dibutuhkan oleh peneliti.
- *Sampling Jenuh*, yaitu teknik yang digunakan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yang mana dalam satu populasi kurang dari 30 orang.

- *Snowball Sampling*, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang semula sedikit kemudian menjadi banyak.

Penelitian ini menggunakan **teknik *Non-Probability Sampling dengan menggunakan Sistem Kuota*** yang mana sesuai dengan penjelasan sebelumnya peneliti memiliki klasifikasi dalam memilih responden, yaitu masyarakat di Kelurahan Terboyo Kulon yang tergolong pada usia produktif dan telah mengetahui informasi apapun tentang proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak maupun tentang pengadaan lahan yang akan terjadi di wilayah tersebut. Sehingga, jawaban dari responden dapat memenuhi kuota atas populasi yang ada.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

1.9.4.1 Jenis Data

Menurut Purwanto, 2011 : 56 – 58 menyatakan terdapat 3 jenis data yang dapat digunakan diantaranya :

- Data berskala nominal, yaitu data dengan skala yang berada pada tingkat paling rendah yang mana angka – angka tersebut digunakan untuk mengklasifikasi suatu objek atau orang atau kasus dalam suatu jenis variabel tertentu. Data ini dapat dikatakan hanya sebagai deretan simbolis semata tanpa adanya perbedaan kelas tertentu.

- Data berskala ordinal, yaitu data yang memiliki makna sebagai urutan suatu fenomena dari yang terkecil hingga yang terbesar. Data ini memiliki kandungan angka yang bersifat kuantitatif dan memiliki kelas.
- Data interval, yaitu data yang memiliki sifat – sifat data ordinal akan tetapi data ini telah memiliki jarak atau interval yang jelas.

Penelitian ini menggunakan data ordinal dengan menampilkan pilihan jawaban dengan memberikan nilai terhadap indikator yang akan diteliti, yaitu :

- 1 : Tidak Baik
- 2 : Cukup Baik
- 3 : Baik
- 4 : Sangat Baik

1.9.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang dijadikan sebagai referensi pembantu, antara lain :

- a. Data Primer, merupakan data yang menjadi acuan utama dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan melakukan observasi serta mengisi kuesioner kepada responden.

b. Data Sekunder, merupakan data pendukung dan sebagai acuan peneliti dalam mengkaji suatu fenomena atau masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari :

- Referensi buku cetakan;
- Artikel atau jurnal dan hasil penelitian terdahulu;
- Sumber – sumber lainnya yang berupa akses internet dan juga berita *online* yang terpercaya.

1.9.5 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran *Likert* dengan menyatakan penilaian responden terhadap masalah yang tengah diteliti kedalam beberapa kategori.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam pengambilan data di lapangan. Wawancara tersebut dilakukan dengan 2 metode, yaitu wawancara secara tatap muka dan wawancara secara daring melalui telepon. Dalam melakukan wawancara, peneliti didukung dengan kuesioner dengan tujuan peneliti selain mendapatkan tolok ukur berdasarkan nominal, juga akan mendapatkan klarifikasi dari jawaban responden secara lisan dan dalam bentuk pernyataan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan teknik observasi sebagai penguat data yang

disampaikan oleh responden terhadap topik yang sedang dibicarakan.

1.9.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner dan juga dengan bantuan alat perekam suara dan kamera sebagai bukti pendukung ketika peneliti akan terjun ke lapangan.

1.9.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data yang digunakan adalah data ordinal, maka uji analisis data yang digunakan adalah uji Kendall-Tau, yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara komunikasi dengan implementasi pengadaan lahan; serta hubungan antara partisipasi dengan implementasi pengadaan lahan. Sugiyono, 2007 : 253 menerangkan perhitungan uji korelasi Kendall-Tau dengan menggunakan rumus berikut :

$$\tau = \frac{\sum A - \sum B}{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Keterangan :

τ : Koefisien korelasi Kendall-Tau

$\sum A$: Jumlah ranking atas

$\sum B$: Jumlah ranking bawah

N : Jumlah anggota sampel

Hasil dari perhitungan tersebut akan menginterpretasikan untuk menilai seberapa kuat hubungan antar variabel. Kemudian, pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan koefisien korelasi tersebut tertera pada tabel berikut :

Tabel 1.7

Pedoman Pemberian Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,8 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2016 : 184)

Setelah menentukan koefisien korelasi, maka perhitungan selanjutnya adalah pengujian signifikansi kedua variabel dengan menggunakan rumus berikut (Sugiyono, 2007 : 238) :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Keterangan :

Z : Signifikansi Variabel

τ : Koefisien Korelasi Kendall-Tau

N : Jumlah Anggota Sampel

Berdasarkan perhitungan tersebut akan dapat menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis yang ditetapkan, dengan

membandingkan Z hitung dengan Z tabel dalam taraf kesalahan 5% yang dirumuskan sebagai berikut :

Jika $Z \text{ hitung} \leq Z \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (artinya tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel)

Jika $Z \text{ hitung} \geq Z \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel)

- Koefisien Konkordansi Kendall-Tau

Koefisien ini dilakukan untuk memperoleh persentase pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen. Untuk rumus perhitungannya yaitu sebagai berikut (Santoso, 2010 : 131) :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2}K^2(N^3 - N)}$$

Apabila dalam proses observasi ditemukan angka yang sama, maka rumusnya yaitu :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2}K^2(N^3 - N) - K\sum T}$$

Keterangan :

W : Koefisien Konkordansi Kendall-Tau

S : Jumlah Kuadrat Deviasi

N : Jumlah Responden

K : Jumlah Variabel

T : Faktor Korelasi Ranking Berangka Sama

$\sum T$: Jumlah Semua Kelompok Angka Sama dalam masing-masing K ranking